

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PROGRAM *SMART AUDITING* DI KANTOR  
INSPEKTORAT KOTA MAKASSAR**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2021**

MILIK PERPUSTAKAAN  
UNISMU MAKASSAR

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PROGRAM SMART AUDITING DI KANTOR  
INSPEKTORAT KOTA MAKASSAR**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh  
Gelar Sarjana (S.Sos)



Disusun dan Diajukan Oleh:

Nur Irma

Nomor Stambuk : 10561 11203 16

Kepada

2021  
Nama :  
Jumlah :  
No. :  
No. :  
No. :

10/09/2021

Exp  
sumbangan Alumni  
R/0194/ADM/21 CD  
IRM  
e'

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

## HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Skripsi : Efektivitas Program *Smart Auditing* di Kantor  
Inspektorat Kota Makassar  
Nama Mahasiswa : Nur Irma  
Nomor Induk Mahasiswa : 10561 11203 i6  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara



Pembimbing I  
Dr. H. Muklis Madani, M.Si

Pembimbing II

Nasrul Haq, S.Sos., MPA

Dekan

Ketua Program Studi



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si  
NBM: 730727

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, is positioned above the name and NBM number.

Nasrul Haq, S.Sos., MPA  
NBM: 1067463

## HALAMAN PENERIMAAN TIM

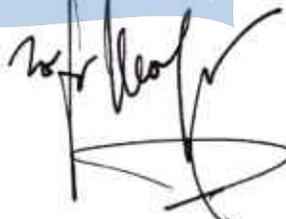
Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0203/FSP/A.3-VIII/VIII/43/2021 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Jumat Tanggal 27 Bulan Agustus Tahun 2021.

Rektor  
  
Dr. Hj. Hiyati Malik, S.Sos., M.Si  
NBM: 730727

Sekretaris  
  
Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si  
NBM: 4084366

### PENGUJI:

1. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si
2. Dr. Anwar Parawangi, M.Si
3. Dr. Abdi, M.Pd
4. Dr. Haerana, S.Sos., M.Pd


## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nur Irma  
Nomor Induk Mahasiswa : 10561 11203 16  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan pemberian sanksi lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 22 Agustus 2021

Yang Menyatakan,



Nur Irma

## ABSTRAK

### **Irma, Muhlis Madani dan Nasrul Haq, Efektivitas Program *Smart Auditing* di kantor Inspektorat Kota Makassar.**

*Smart Auditing* merupakan pengembangan model pemeriksaan pertanggungjawaban pengelolaan kegiatan keuangan berbasis elektronik dengan sistem yang memadukan *e-budgeting* dan *e-auditing* yang diharapkan bisa lebih memudahkan auditor Inspektorat Kota Makassar dalam melihat proses pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan SKPD secara *online*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas program *Smart Auditing* di kantor Inspektorat Kota Makassar dengan menggunakan teori Sutrisno. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 7 orang. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan menggunakan langkah reduksi data, penyajian data, dan tahap akhir penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian, menunjukkan bahwa program *Smart Auditing* sudah bisa dikatakan efektif. Pengembangan *Smart Auditing* sejalan dengan Konsep *Sombere* dan *Smart City* kota Makassar yang mengharuskan seluruh SKPD agar menerapkan teknologi informasi mengefisienkan tugas pokok dan fungsinya. Dengan adanya *Smart auditing* ini kegiatan pemeriksaan dokumen bisa lebih cepat dilakukan meskipun dengan jumlah auditor yang terbatas, dokumen lebih teratur dan dapat dengan mudah dideteksi serta jika ada kesalahan dalam pelaporan bisa segera diperbaiki. Dimasa pandemic seperti ini juga *Smart Auditing* menjadi solusi bagi auditor sebab melakukan pemeriksaan tidak perlu tatap muka.

**Kata kunci :** Efektivitas, Program *Smart Auditing*

## KATA PENGANTAR

Penulis Panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kahadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Efektivitas Program *Smart Auditing* Di Kantor Inspektorat Kota Makassar"

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Abd Rahman dan Ibu Nurlia yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mengarahkan dan senantiasa mendoakan serta memberikan bantuan yang tidak ternilai baik moral maupun material, nasehat serta pengorbanan yang tidak terhingga dalam kehidupan ini.
2. Bapak Dr. H. Muhlis Madani, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Nasrul Haq, S.Sos., MPA selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Bapak Nasrul Haq, S.Sos., MPA selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara oleh limpahan ilmu yang diberikan kepada penulis sebagai bekal dimasa yang akan datang.
7. Bapak dan Ibu Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Bapak Drs. H. Zainal Ibrahim, M.Si selaku Inspektur Inspektorat Kota Makassar yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
9. Seluruh staff dan pegawai Inspektorat Kota Makassar yang telah ramah menerima serta meluangkan waktu untuk memberikan data berupa wawancara kepada penulis selama proses penelitian.
10. Teruntuk Irawani Anis, Ika Saputri, Mariam dan Yulianti. Terima kasih sudah menjadi sahabat terbaik yang selalu memberikan dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan. Semoga Allah SWT selalu memudahkan langkah kita menuju jalan kesuksesan.
11. Muhammad Asri yang selalu ada untuk mendengarkan keluh kesah dan terus memberikan semangat serta motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

12. Rekan-rekan seperjuangan di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2016 atas kebersamaannya selama ini.
13. Teman-teman KKP 2016 Desa Lalabata, Barru. Rini, Nita, Selviana, Nisma, Rita, Laemang dan Apri. Terima kasih atas kebersamaan dan pengalaman yang sangat berharga selama 60 hari.
14. Rekan-rekan seperjuangan di Lembaga *Centre of English Studies* (CESIST) Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar atas kebersamaannya selama ini.

Demi Kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 22 Agustus 2021

Penulis,

Nur Irma

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR.....	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	8
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Teori dan Konsep Efektivitas.....	10
C. Teori dan Konsep Program.....	18
D. Kerangka Pikir.....	21
E. Fokus Penelitian.....	21
F. Definisi Fokus.....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	24
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	24
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	24
C. Informan.....	25
D. Teknik Pengumpulan Data.....	25
E. Teknik Analisis Data.....	26
F. Teknik Pengabsahan Data.....	27
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	29
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	29
B. Hasil Penelitian.....	38
C. Pembahasan Penelitian.....	54
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	67
<b>LAMPIRAN</b> .....	69
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	87

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Informan Penelitian.....	25
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Kecamatan Kota Makassar 2020.....	30
Tabel 4.2	Data Program, Kegiatan dan Anggaran Lingkup Pemerintah Kota Makassar.....	39
Tabel 4.3	Kondisi Sebelum dan Setelah Adanya Smart Auditing.....	54



## DAFTAR GAMBAR

Gambar.2.1 Kerangka Pikir Penelitian .....	21
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kota Makassar .....	29
Gambar 4.2 Sistem Kerja <i>Smart Auditing</i> .....	36



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Persepsi tentang efektivitas sesungguhnya bersumber dari salah satu kriteria ilmu administrasi negara yang berkembang secara ilmiah ke dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia untuk mencapai tujuan yang mereka kehendaki. Dalam usaha mencapai tujuan yang telah diterapkan, bukan hanya kelemahan yang menjadi masalah dalam kelompok maupun organisasi, tetapi bagaimana mengubah kelemahan menjadi kekuatan sehingga tujuan yang ditetapkan sebelumnya itu dapat terlaksana dengan baik untuk menciptakan keberhasilan sesuai dengan yang ditetapkan sebelumnya.

Dalam rangka menentukan tingkat efektivitas keberhasilan sebuah kelompok atau organisasi maka harus melakukan perbandingan antara kebenaran atau ketepatan dengan kekeliruan yang dilakukan. Semakin rendah tingkat kekeliruan yang terjadi, tentu juga akan semakin mendekati ketepatan dalam pelaksanaan setiap aktivitas atau pekerjaan yang dibebankan. Namun demikian bukan berarti bahwa efektivitas hanya bersumber dari kesalahan atau kekeliruan yang telah dilakukan, tetapi juga harus dipadukan dengan aktivitas berpikir secara rasional, kemudian di implementasikan ke dalam suatu tindakan yang lebih tepat, sehingga tujuan yang hendak di capai dapat memberikan hasil yang memuaskan kepada semua pihak baik sebagai anggota individu, kelompok maupun organisasi.

Keefektifan dalam menjalankan suatu aktivitas senantiasa harus di

lengkapi dengan rambu-rambu untuk dipenuhi sepenuhnya dan apabila dikemas dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi akan memberikan hasil yang semaksimal mungkin dan bisa menciptakan kekuatan organisasi yang baik yang berkaitan dengan pemerintahan maupun yang berkaitan dengan swasta. Maka dengan demikian efektifitas dapat dikatakan sebagai ketepatan harapan, implementasi dan hasil yang dicapai. Sedangkan kegiatan yang tidak efektif merupakan kegiatan yang mengalami kesenjangan antara harapan, implementasi dengan hasil yang dicapai.

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, seorang kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari beberapa unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat dan unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan. Unsur yang mendukung tugas kepala daerah untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah.

Salah satu bagian yang melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan APBD dan kegiatan non keuangan pemerintah daerah adalah inspektorat daerah. Fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa dalam menjalankan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua,

perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. Menurut Boynton (2007), fungsi auditor internal adalah melaksanakan fungsi pemeriksaan internal yang merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji serta mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Selain itu, auditor internal diharapkan juga bisa memberikan sumbangan bagi perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi.

Dalam melaksanakan peran audit, auditor bertanggung jawab untuk merencanakan serta melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji yang material. Dengan dukungan kompetensi maupun teknik-teknik audit serta kompetensi lain melalui jenjang pendidikan formal dan informal serta pengalaman dalam praktik audit, maka auditor harus mampu mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti yang digunakan untuk mendukung pertimbangan yang diberikan.

Mengingat pentingnya tugas-tugas yang diemban oleh auditor internal/inspektorat, maka perlu diperhatikan bahwa tugas dan fungsi yang diemban dapat dijalankan dengan baik. Keahlian dan kecakapan teknis untuk melakukan pemeriksaan merupakan suatu hal yang sangat signifikan dalam menjalankan tugas tersebut, namun hal itu tidak cukup untuk memastikan pelaksanaan tugas dengan baik.

Sampai saat ini belum seluruh APIP (Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah) memiliki standar yang sama, oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 mengenai Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Dalam peraturan menteri tersebut disebutkan bahwa standar audit aparat pengawasan intern pemerintah, meliputi standar-standar yang terkait dengan mutu organisasi dan individu-individu yang melakukan kegiatan audit. Pada Standar Umum mengenai keahlian, secara garis besar menegaskan bahwa keahlian pemeriksa harus memiliki latar belakang pendidikan, kompetensi teknis, serifikasi jabatan serta pendidikan dan pelatihan.

Tantangan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang saat ini dihadapi oleh Inspektorat Kota Makassar sangat kompleks. Model dan cara pemeriksaan pengelolaan kegiatan serta pertanggungjawaban administrasi keuangan pada SKPD yang selama ini dilakukan Inspektorat Daerah Kota Makassar dengan cara pemeriksaan komprehensif setiap bulannya membutuhkan strategi baru yang lebih efektif dan efisien karena kompleksitas permasalahan yang dihadapi. ([inspektorat.makassarkota.go.id](http://inspektorat.makassarkota.go.id))

Berdasarkan data APBD Kota Makassar TA 2018, jumlah program dan kegiatan yang dikelola seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar yakni sebanyak 581 program dan 4097 kegiatan. Dengan memperhatikan data-data tersebut kemudian membandingkan dengan keterbatasan SDM yang dimiliki oleh Inspektorat Kota Makassar saat ini yang hanya memiliki jumlah

auditor bersertifikasi sebanyak 23 orang, maka dibutuhkan sebuah strategi baru dalam model pengawasan dan pemeriksaan pada entitas SKPD. (makassar.tribunnews.com)

Di Indonesia perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah memberikan banyak keuntungan pada berbagai bidang seperti bidang perekonomian, pemerintahan, pendidikan dan bidang lainnya. Adanya pemanfaatan teknologi informasi ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih ekonomis, efisien, dan efektif. Seiring dengan perkembangan tersebut semua organisasi atau perusahaan membutuhkan informasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya untuk mendapatkan manfaat yang maksimal.

Upaya pemerintah dalam menanggapi permasalahan tersebut ialah dengan mengembangkan Model Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pengelolaan Kegiatan dan Keuangan Berbasis elektronik (*E-Auditing* atau *Smart Auditing*). Model ini memadukan proses *e-budgeting* dan *e-auditing*, sehingga bisa lebih memudahkan auditor Inspektorat Daerah Kota Makassar dalam melihat progress Pertanggung Jawaban Keuangan dan Kegiatan seluruh SKPD secara *online*, dimana selama ini dilakukan secara manual. Smart Auditing menyediakan data pertanggung jawaban keuangan yang bermanfaat dalam menunjang kelancaran pengawasan dan pengendalian program atau kegiatan SKPD yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

Sistem Elektronik Auditing atau yang kini disebut Smart Auditing merupakan sebuah alat (*tools*) dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan

pemeriksaan, dimana peran Sumber Daya Manusia dalam SKPD sangat menentukan keberhasilan pelaksanaannya secara keseluruhan, sehingga diharapkan terdapat dukungan, bantuan dan komitmen yang kuat dari seluruh Kepala SKPD dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar dalam implementasinya. Sistem penerapan *Smart Auditing* yang maksimal juga akan mewujudkan birokrasi yang bersih.

Dengan pemanfaatan teknologi informasi ini diharapkan dapat mengefisienkan tugas pokok dan fungsi SKPD, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kegiatan maupun keuangan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul "Efektivitas Program *Smart Auditing* di Kantor Inspektorat Kota Makassar"

## B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang tersebut adalah bagaimanakah Efektivitas Program *Smart Auditing* di Kantor Inspektorat Kota Makassar?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui Efektivitas Program *Smart Auditing* di Kantor Inspektorat Kota Makassar.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi

atau masukan bagi perkembangan teknologi dan informasi pada umumnya dan Ilmu Administrasi Negara khususnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya menciptakan inovasi seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi serta untuk meningkatkan kualitas kerja pemerintah agar lebih efektif.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian akan mengangkat judul “Efektivitas Program *Smart Auditing* di Kantor Inspektorat Kota Makassar” yang akan dilakukan di Inspektorat Kota Makassar. Dalam melakukan penelitian perlu dilakukan peninjauan terhadap penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Peneliti mengambil tiga hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan Efektivitas Program *Smart Auditing*, antara lain :

1. Efektifitas Pengawasan Khusus Oleh Inspektorat Kabupaten Sigi (Ruddin,2015).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pencapaian sasaran pengawasan khusus yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sigi dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam (*in-dept intetrvieu*).

Hasil penelitian mengungkap bahwa efektifitas pengawasan khusus yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sigi tidak berjalan dengan efektif karena beberapa indikator didalamnya masih mengalami permasalahan.

2. Efektivitas Fungsi Pengawasan Inspektorat Terhadap Kinerja Pegawai Studi Kasus Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 (Nabila & Canalldhy,2018).

Penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas pengawasan inspektorat terhadap kinerja pegawai BKD Kabupaten Ogan Komering Ilir dan faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi pengawasan inspektorat terhadap kinerja pegawai BKD Kabupaten Ogan Komering Ilir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis, untuk menggambarkan efektivitas fungsi dan peranan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir terhadap BKD Kabupaten Ogan Komering Ilir belum terlaksana secara efektif dan ada 2 faktor yang mempengaruhi pengawasan Inspektorat terhadap Badan Kepegawaian dan Diklat yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu aparat pengawasan dalam hal ini tenaga pemeriksaan yang belum menetapkan bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi pada Instansi BK, sedangkan faktor eksternal berupa ketersediaan sarana dan prasarana yang diberikan serta adanya kelainan yang dilakukan objek pemeriksaan.

3. Pengaruh Kualitas Audit Internal Terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang (Dityatama,2012).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas audit internal terhadap efektivitas sistem pengendalian internal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan

metode survei, dengan tingkat eksplanasi asosiatif dengan teknik analisa data kuantitatif/ positivism.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas audit internal berpengaruh positif terhadap efektivitas sistem pengendalian internal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Belum efektifnya sistem pengendalian internal instansi/SKPD, diantaranya karena belum didukung dengan kualitas audit internal yang memadai.

## **B. Teori dan Konsep Efektivitas**

### **1. Pengertian Efektivitas**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Dalam kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Menurut Siagian dalam Indrawijaya (2010) memberikan pengertian tentang efektivitas yaitu penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Dalam hal ini suatu pelaksanaan tugas dinilai baik atau tidak dilihat bagaimana melaksanakannya dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Hasibuan (2008), melihat efektivitas dari prestasi kerja bahwa prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang didasarkan atas kecakapan, usaha dan kesempatan. Lebih jelas bahwa kecakapan, usaha dan kesempatan dapat memberikan hasil kerja yang disebut dengan efektif. Hasibuan menyatakan bahwa efektivitas adalah

tercapainya sasaran yang eksplisit dan implisit. Pernyataan tersebut cenderung mengandung efektivitas dalam tingkat efisiensi (Indrawijaya, 2010).

Menurut Robbins dalam Indrawijaya (2010), bahwa efektivitas dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian organisasi atas tujuan jangka pendek (tujuan) dan jangka panjang (cara). Pemilihan mencerminkan kontribusi strategis, minas mengevaluasi dan tingkat kehidupan organisasi. Lebih lanjut menurut Saxena dalam Indrawijaya (2010), mengemukakan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, waktu) telah tercapai. Makin besar target yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektivitas. Konsep orientasinya lebih tertuju pada keluaran. Masalah penggunaan masukan tidak menjadi isu dalam konsep ini. Pada umumnya orientasi pemerintah (yang tidak mencari laba) berorientasi pada pencapaian efektivitas.

Menurut Emerson dalam Handayani (2006), efektivitas adalah "pengukuran dalam tercapainya sasaran serta tujuan yang telah ditentukan sebelumnya". Sedangkan menurut Pasolong (2007), efektivitas berasal dari kata "Efek" dan digunakan dalam istilah ini dalam sebuah hubungan sebab akibat. Efektivitas dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat dicapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

Kemudian menurut Sedarmayanti (2006), efektivitas adalah suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai.

Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting perannya di dalam setiap lembaga dan berguna untuk melihat perkembangan maupun kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga.

Menurut Gie dalam Budiani (2007) menyebutkan bahwa efektifitas adalah suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki. Jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendaki. Maka pekerjaan tersebut dapat dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki sebelumnya.

Dari beberapa deskripsi tentang efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas mengarah kepada pencapaian tujuan, yakni pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

## 2. Pendekatan Efektivitas

Ada beberapa jenis pendekatan yang dikemukakan oleh beberapa ahli untuk membahas efektivitas suatu organisasi atau program. Pendekatan-pendekatan penting dikemukakan sebagai dasar pengukuran efektivitas.

Secara eksplisit, Robbin yang dikutip Indrawijaya (2010), mengemukakan empat pendekatan dalam memandang efektivitas suatu organisasi yaitu sebagai berikut:

- a. Pendekatan pencapaian tujuan (*goals attainment approach*).

Pendekatan yang mengandung bahwa keefektifan suatu organisasi

harus dinilai sehubungan dengan pencapaian tujuan (*ends*), keseimbangan caranya (*means*). Pendekatan ini mengasumsikan bahwa organisasi adalah kesatuan yang dibuat dengan sengaja, rasional dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, pencapaian tujuan yang berhasil menjadi sebuah tujuan yang tepat tentang efektivitas.

- b. Pendekatan sistem (*system approach*). Pendekatan sistem yang mengasumsikan bahwa untuk meningkatkan kelangsungan hidup organisasi, maka yang perlu diperhatikan adalah sumber daya manusianya, mempertahankan diri secara internal dan memperbaiki struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi agar dapat berintegrasi dengan lingkungan dari organisasi.
- c. Pendekatan konstituensi-strategi (*strategic-constituencies approach*). Pendekatan ini memandang pada pemenuhan tuntutan konstituensi itu dalam lingkungan yang dari orang tersebut memerlukan dukungan yang terus menerus bagi kelangsungan hidup suatu organisasi.
- d. Pendekatan nilai-nilai yang bersaing (*competing value approach*). Pendekatan ini adalah gabungan dari ketiga pendekatan diatas, masing-masing didasarkan atas suatu kelompok nilai. Masing-masing nilai selanjutnya lebih disukai berdasarkan daur hidup dimana organisasi itu berada.

Dari tiga pendekatan tersebut dapat dikemukakan bahwa efektivitas merupakan konsep yang mampu memberikan gambaran tentang keberhasilan suatu lembaga dalam mencapai sasarnya. Selanjutnya

untuk mengetahui tercapainya sebuah tujuan dalam suatu program dibutuhkan ukuran efektifitas untuk mengukur keberhasilan sebuah program.

### 3. Pengukuran Efektivitas

Dalam mengukur efektivitas suatu program maupun kegiatan harus memperhatikan beberapa indikator menurut Sutrisno (2007), yaitu:

- a. Pemahaman program
- b. Ketepatan sasaran
- c. Tepat waktu
- d. Tercapainya tujuan
- e. Perubahan nyata

Makmur (2011) mengungkapkan indikator efektivitas dilihat dari beberapa segi kriteri efektivitas, yaitu sebagai berikut:

- a. Ketepatan waktu

Waktu merupakan dasar dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dalam sebuah organisasi tetapi juga dapat memberikan dampak berupa kegagalan terhadap suatu aktivitas organisasi. Apapun yang menggunakan waktu secara tepat akan mampu menciptakan efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

- b. Ketepatan perhitungan biaya

Berhubungan dengan ketepatan dalam pemanfaatan biaya, yang berarti tidak terjadi kekurangan juga kelebihan dalam pembiayaan sampai tiba

saatnya kegiatan terlaksana dan diselesaikan dengan baik. Ketepatan dalam hal biaya merupakan komponen dasar dari efektivitas.

c. Ketepatan pengukuran biaya

Dengan ketepatan dalam hal ukuran sebagaimana yang telah ditentukan sebelumnya sebenarnya merupakan gambaran dari pada efektivitas kegiatan yang merupakan tanggung jawab dalam suatu organisasi.

d. Ketepatan dalam menentukan pilihan

Dalam menentukan pilihan tidaklah merupakan suatu persoalan yang mudah dan bukan hanya suatu prediksi melainkan melalui suatu proses, sehingga mampu menemukan yang terbaik diantara yang baik atau yang terjujur diantara yang jujur atau juga kedua-duanya yang terbaik dan terjujur diantara yang baik dan jujur.

e. Ketepatan berpikir

Ketepatan didalam berfikir akan menciptakan keefektivan sehingga kesuksesan yang sering diharapkan itu dalam melakukan kerjasama akan memberikan hasil yang maksimal.

f. Ketepatan dalam menentukan tujuan

Ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan aktivitas organisasi didalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang tepat akan mampu mendukung efektivitas pelaksanaan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang

g. Ketepatan sasaran

Penentuan sasaran yang tepat dari suatu individu atau organisasi akan sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi, begitu juga sebaliknya jika sasaran yang ditentukan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan kegiatan tersebut.

Pendapat lain, Sugiono dalam Budiani (2007), menyebutkan beberapa indikator untuk mengukur efektivitas adalah sebagai berikut:

- a. Ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana peserta program tepat yang sudah ditentukan sebelumnya. Menurut Makmur (2011) ketepatan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional, penentu sasaran yang tepat baik ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Begitu pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan tersebut kurang tepat maka bisa menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.
- b. Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.
- c. Tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
- d. Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.



#### 4. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Sutarto dalam Tangkilisan (2002), mengemukakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektifitas adalah sebagai berikut:

- a. Faktor Internal meliputi sebagai keseluruhan faktor yang ada dan berkaitan dengan sekelompok orang yang melakukan aktivitas kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Tangkilisan (2005) adanya kerjasama yang merupakan unsur terpenting dalam suatu lembaga. Hubungan kerjasama yang baik maka keberhasilan pencapaian tujuannya akan lebih cepat. Kerjasama ini bukan hanya terjadi antara individu dengan individu melainkan dapat juga dengan individu dengan instansi atau instansi dan instansi. Menurut Djamin dalam Hasibuan (2011), menyebutkan bahwa sebagai suatu usaha kerjasama antar badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Selanjutnya Makmur (2011), berpendapat bahwa hubungan kerja dalam kelembagaan pemerintah sangat dibutuhkan suatu bentuk pemikiran dan tindakan secara nyata agar bangunan hubungan kerja itu dapat memberikan manfaat baik anggota kelembagaan pemerintah itu sendiri maupun bagi anggota masyarakat pada umumnya. Koordinasi merupakan suatu usaha yang mampu menyelenggarakan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu lembaga. Faktor-faktor internal tersebut antara lain :

- 1) Departemenisasi, kegiatan menyusun satuan-satuan dalam suatu lembaga.
  - 2) Fleksibilitas, keadaan dimana struktur organisasi mudah diubah untuk disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan yang ada.
  - 3) Rentangan kontrol
  - 4) Berkelanjutan, kondisi untuk memberikan dukungan dengan berbagai sumber daya yang dimiliki agar aktivitas dapat berjalan terus.
  - 5) Kepemimpinan (*leader*), proses pemerintah yang mempengaruhi agar kegiatan yang saling terkait dapat diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
  - 6) Keseimbangan, ditempatkan pada struktur dan perannya masing-masing.
- b. Faktor Eksternal mencakup suatu jaringan hubungan-hubungan pertukaran dengan sejumlah lembaga dan melibatkan diri dengan maksud untuk mendapatkan dukungan, mengatasi hambatan, melakukan sumber daya, menata lingkungan yang kondusif dan proses transformasi nilai maupun inovasi maupun norma sosial yang ada.

### C. Teori dan Konsep Program

#### 1. Pengertian Program

Kata program berasal dari bahasa Inggris "programe" yang artinya acara atau rencana. Secara konseptual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, program diartikan sebagai rancangan mengenai asas serta usaha yang akan dijalankan oleh seseorang atau suatu kelompok tertentu.

Secara umum pengertian program adalah penjabaran dari suatu rencana. Dalam hal ini program merupakan bagian dari perencanaan. Sering pula diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan.

Menurut Manila dalam Jones (1996) berpendapat bahwa program akan menunjang implementasi, program tersebut memuat berbagai aspek antara lain:

- e. Adanya tujuan yang ingin dicapai
- f. Adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil dalam mencapai tujuan
- g. Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dalam prosedur yang harus dilalui
- h. Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan
- i. Adanya strategi dalam pelaksanaan

Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasikan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian program yang telah diuraikan.

Menurut Charles (1996), program adalah cara yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan dari beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu:

- a. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program

- b. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya juga diidentifikasi melalui anggaran
- c. Program memiliki identitas sendiri, program yang berjalan efektif dapat diakui oleh publik.

Dengan beberapa pendapat tersebut diatas maka bisa disimpulkan bahwa program adalah serangkaian tindakan atau aktivitas untuk dapat melaksanakan sesuai dengan target rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

#### **D. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir adalah sebagai alur pemikiran yang diambil dari suatu teori yang dianggap relevan dengan fokus atau judul penelitian dalam upaya untuk menjawab masalah-masalah yang sudah ada di rumusan masalah penelitian tersebut.

Untuk melihat Efektivitas Program *Smart Auditing* di Kantor Inspektorat Kota Makassar dapat dilihat dari teori efektivitas menurut Sutrisno (2007) dengan indikator sebagai berikut:

1. Pemahaman program, dilihat sejauh mana program tersebut dapat dipahami.
2. Tepat sasaran, dilihat dari apa yang dikehendaki tercapai atau menjadi kenyataan.
3. Tepat waktu, dilihat melalui penggunaan waktu untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan tersebut apakah telah sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya.

4. Tercapainya tujuan, diukur melalui pencapaian tujuan program yang telah dijalankan.
5. Perubahan nyata, diukur melalui sejauhmana program tersebut memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi organisasi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas penulis menggambarkan bagan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Pikir Penelitian

#### E. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi oleh karena itu fokus penelitian yang diambil terkait dengan Efektivitas Program *Smart Auditing* di

Kantor Inspektorat Kota Makassar yang diangkat dari tujuan penelitian, kemudian dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka, kemudian mencocok antara teori dan fakta yang ada di lapangan. Maka dari itu untuk mengukur efektivitas program peneliti mengambil teori Menurut Sutrisno (2007) mengidentifikasi hasil studi para ahli mengenai indikator efektifitas, yaitu : Pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata.

#### F. Deskripsi Fokus

Deskripsi fokus penelitian merupakan uraian dari masing-masing fokus yang akan di amati untuk memberikan kejelasan tentang pengamatan, yang di uraikan sebagai berikut:

1. Pemahaman pogram, yaitu dilihat sejauh mana auditor memahami program *Smart Auditing* melalui kegiatan diseminasi dan *choacing clinic* Auditing Berbasis Elektronik.
2. Tepat sasaran, yaitu dilihat segi tepat sasaran yang merupakan indikator yang penting dalam menentukan berhasil tidaknya suatu program, dalam pelaksanaan program *Smart Auditing* yang ingin dilihat adalah ketepatan sasaran yang ingin dicapai apakah sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau tidak.
3. Tepat waktu, yaitu dilihat melalui penggunaan waktu yang dibutuhkan oleh para auditor untuk melaksanakan tugasnya dengan tepat waktu melalui program *Smart Auditing*.

4. Tercapainya tujuan, yaitu dilihat dari bagaimana peran Sumber Daya Manusia serta dukungan yang kuat dalam pengimplementasian program *Smart Auditing*.
5. Perubahan nyata, yaitu diukur melalui sejauh mana program *Smart Auditing* memberikan efek atau dampak dalam melaksanakan tugasnya yang selama dilakukan secara manual.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama dua bulan mulai tanggal 16 November 2020 sampai tanggal 14 Januari 2021. Penelitian ini berlokasi di Kantor Inspektorat Kota Makassar Jalan Teduh Bersmar No.07 Komp. Griya Fajar Mas, Makassar 90224. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengukur efektivitas program dan lokasi inilah program *Smart Auditing* diterapkan.

#### B. Jenis Dan Tipe Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian tentang "Efektivitas Program *Smart Auditing* di Kota Makassar" ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yakni memberikan gambaran serta penjelasan yang tepat mengenai permasalahan yang dihadapi, bertujuan membuat deskripsi atas suatu fenomena sosial/alam secara sistematis, faktual dan akurat. Ini akan memberikan gambaran kenyataan dari kejadian yang diteliti atau dilakukan terhadap variabel mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkannya dengan variabel lain.

##### 2. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang memberikan gambaran berdasarkan fenomena atau kenyataan yang terjadi mengenai Efektivitas Program *Smart Auditing* di Kantor Inspektorat Kota Makassar

### C. Informan

Dalam penelitian ini memerlukan informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan pengoperasian *Smart Auditing* guna memperoleh data dan informasi yang akurat, serta informan yang diambil dengan pertimbangan bahwa informan yang dipilih dianggap banyak mengetahui atau berkompeten terhadap pengoperasian *Smart Auditing* tersebut. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No.	Informan	Inisial	Jabatan	Jumlah
1.	Leonardo Konstantin, S.Kom	LK	Analisis Sistem Informasi	1
2.	Drs. Anwar Dahlan, M.Si	AD	Pengendali Teknis	1
3.	Yasser, S.E	Y	Auditor Pertama	1
4.	Syahriati, S.Sos	S	Auditor Madya	1
5.	Gatoet Bandung, S.T	GB	Auditor Muda	1
6.	Nurawaliah, S.E	N	Auditor Muda	1
7.	Imelda Wiraswanti, S.E	IW	Auditor Muda	1
Jumlah				7

### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan triangulasi/gabungan. Triangulasi yaitu teknik dalam pengumpulan data yang bersifat menyatukan dari berbagai sumber data yang sudah didapatkan dengan teknik pengumpulan data.

#### 1. Teknik Observasi

Observasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung ke Kantor Inspektorat Kota Makassar, serta bagaimana melihat bagaimana pelaksanaan dan pengoperasian *Smart Auditing* menurut para informan yang bersangkutan.

## 2. Wawancara

Wawancara yaitu bentuk penelitian yang dilakukan untuk memperoleh sejumlah data tentang *Smart Auditing* dengan melakukan tanya jawab, dialog atau diskusi langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dan pengoperasian *Smart Auditing* melalui daftar pertanyaan yang telah penulis persiapkan sebelumnya.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan peneliti adalah dengan menggunakan alat perekam, foto dan dokumen. Alat perekam digunakan untuk merekam wawancara yang dilakukan antara penulis dengan informan berupa rekaman audio, foto digunakan penulis untuk membuktikan bahwa penulis telah melakukan wawancara dengan informan yang bersangkutan, serta dokumen yang berkaitan dengan *Smart Auditing* untuk memudahkan peneliti dalam pengumpulan data yang dibutuhkan.

## E. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengutamakan pengungkapan melalui keterangan yang didukung serta ditunjang dengan data sekunder. Untuk menganalisa berbagai fenomena dilapangan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi langsung maupun dokumentasi,

2. Reduksi data

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Langkah ini dilakukan untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian.

3. Penyajian data

Penyajian data dilakukan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga bisa lebih mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif.

4. Tahap akhir

Tahap akhir adalah menarik kesimpulan yang dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan sehingga data-data yang teruji validitasnya.

#### **F. Teknik Pengabsahan Data**

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi Teknik

Menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara dan sumber yang sama tetapi menggunakan teknik yang berbeda. Misal data diperoleh dengan

wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi.

### 3. Triangulasi waktu

Waktu dapat mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat nara sumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Pengujian keabsahan data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan wawancara, observasi maupun teknik lain dalam waktu / situasi yang berbeda. Jika hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan berulang kali sehingga sampai ditemukan kapasitas datanya.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Lokasi Penelitian

##### 1. Keadan Geografis Kota Makassar



Gambar 4.1

Peta Wilayah Kota Makassar

Kota Makassar merupakan Ibu Kota dari Provinsi Sulawesi Selatan, yang berada pada bagian Selatan Pulau Sulawesi yang dulu dikenal sebagai Ujung Pandang, terletak antara  $119^{\circ}24'17'38''$  BT dan  $5^{\circ}8'6'19''$  LS yang berbatasan sebelah Utara yaitu Kabupaten Maros, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan batas sebelah Barat yaitu Selat Makassar. Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan  $0-2^{\circ}$  (datar) dan kemiringan lahan  $3-15^{\circ}$  (bergelombang). Wilayah Kota Makassar tercatat memiliki luas 175,77 km persegi. Kota Makassar memiliki kondisi iklim sedang-tropis memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara  $26^{\circ}\text{C} - 29^{\circ}\text{C}$ .

Segi administrasi Kota Makassar terbagi menjadi 15 kecamatan dengan 153 kelurahan. Diantara 15 kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Wajo, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalate, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Mariso.

(Sumber : <https://makassarkota.go.id>)

Tabel A.1  
Jumlah Penduduk Kecamatan Kota Makassar 2020

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Mariso	30,849	30,017	60,866
2	Mamajang	30,194	31,363	61,557
3	Tamalate	104,013	105,201	209,214
4	Rappocini	82,967	88,926	171,893
5	Makassar	42,699	43,010	85,709
6	Ujung Pandang	13,796	15,423	29,219
7	Wajo	15,565	16,041	31,606
8	Bontolala	27,974	29,405	57,379
9	Ujung Tanah	18,143	17,568	35,711
10	Tallo	70,453	70,168	140,621
11	Panakkukang	74,217	75,972	150,189
12	Manggala	76,999	76,175	153,174
13	Biringkanaya	113,309	113,312	226,621
14	Tamalanrea	57,026	59,986	117,012
15	Sangkarang	7,281	7,321	14,602
	<b>Makassar</b>	<b>765,485</b>	<b>779,888</b>	<b>1,545,373</b>

(Sumber: BPS Kota Makassar Tahun 2020)

## 2. Profil Inspektoat Inspektorat Kota Makassar

Inspektorat Daerah Kota Makassar dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah Kota Makassar adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh

seorang Inspektur yang ddalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Walikota dan secara teknis *administrative* mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Dalam rangka memenuhi target RPJMN, maka BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2017 di Inspektorat Daerah Kota Makassar, melakukan penelaian untuk peningkatan kapabilitas APIP menuju level 3. Atas penilaian ini Inspektorat Daerah Kota Makassar telah mencapai APIP level 3.

Demikian pula dengan Maturitas SPIP, pihak BPKP Perwakilan Provisi Sulawesi Selatan tahun 2017 di Inspektorat Daerah Kota Makassar, melakukan penilaian maturitas SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Makassar melalui *Reassessment* maka berdasarkan laporan nomor : LAP-804/PW21/3/20187 mendapatkan nilai "3,266 atau "terdefinisi".

Inspektorat Daerah Kota Makassar juga telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 dan yang terbaru adalah 9001:2015 tentang penerapan Sistem Manajemen Mutu dari *United Registrar Of System*.

#### a. Visi Dan Misi Inspektorat Kota Makassar

Visi inspektorat daerah kota maksssar yaitu "Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui pengawasan yang efektif dan professional"

Untuk mwujudkan visi tersebut maka didukung denga Misi "Terwujudnya pengawasan internal pemerintah Kota Makassar yang efektif:

## b. Susunan Organisasi Inspektorat Kota Makassar

Struktur Organisasi memegang peranan yang amat penting, karena menyangkut tugas dan tanggung jawab para pegawai yang ada didalamnya. Struktur organisasi dibuat agar maksud dan tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik karena dengan adanya struktur organisasi terdapat pembagian tugas dan tanggungjawab yang baik.

Pengorganisasian merupakan suatu proses yang dimaksudkan untuk menciptakan kerjasama dan hubungan yang harmonis antara bagian-bagian dalam suatu organisasi. Bagian-bagian yang dimaksudkan itu adalah orang-orang yang melaksanakan pekerjaan, alat yang digunakan serta metode yang digunakan dalam pengorganisasian. Bagian-bagian tersebut tergambar dalam struktur organisasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar, Inspektorat Daerah Kota Makassar adalah unsur pengawas penyelenggara pemerintah daerah, yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Walikota Makassar dan secara teknis *administrative* mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi inspektorat menurut peraturan daerah kota Makassar nomor 8 tahun 2016 terdiri atas:

### 1. Inspektorat

2. Sekretaris, terdiri atas:
  - a) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b) Kepala Sub Bagian Perencanaan
  - c) Kepala Sub Bagian Evaluasi Dan Perencanaan
3. Inspektur Pembantu Wilayah I
4. Inspektur Pembantu Wilayah II
5. Inspektur Pembantu Wilayah III
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV
7. Kelompok Jabatan Fungsional

**c. Uraian Pekerjaan**

1. Inspektur

Inspektur kota Makassar mempunyai tugas pokok membantu wali kota dalam penyelenggaraan pemerintahan kota

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok yaitu memberikan pelayanan teknis administrative dan fungsional kepada semua satuan 39 organisasi dalam lingkup inspektorat di bawah dan dan bertanggung jawab langsung kepada inspektur.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, melaksanakan urusan ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian, mengelola administrasi keuangan dan perlengkapan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan anggaran, pembukuan,

pertanggungjawaban dan merumuskan rencana kebutuhan perlengkapan.

4. Sub Bagian Perencanaan

Mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.

5. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.

6. Inspektur Pembantu Wilayah

Mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan koordinasi di bidang pengawasan sesuai dengan wilayah kerjanya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan pengawasan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. *Smart Auditing*

Auditor pada Inspektorat Kota Makassar terbagi menjadi 6 tim masing-masing memeriksa 10 SKPD setiap bulannya termasuk dalam

pemeriksaan rutin bulanan. Pada 6 tim audit tersebut terdiri dari wakil penanggungjawab (WPJ) ketua dan beberapa anggota. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan aparatur yang ditugaskan oleh pimpinan, seperti pemebentukan tim oleh semua auditor. Masing-masing tim tersebut telah dibagi berdasarkan wilayah kerjanya oleh Inspektur Wilayah Pembantu (IRBAN). Tim tersebut berisi wakil penanggungjawab, ketua dan apara anggotanya.

*Smart Auditing* merupakan pengembangan model pemeriksaan pertanggungjawaban pengelolaan kegiatan dan keuangan berbasis elektronik. *Smart Auditing* terintegrasi dengan sistem pengelolaan keuangan sehingga jika terjadi perubahan data pada sistem pengelola keuangan maka secara otomatis data pada *Smart Auditing* juga akan berubah secara *real time*, memudahkan SKPD pada saat upload dokumen pertanggungjawaban. *Smart Auditing* juga dapat menyaring dan menampilkan dokumen pertanggungjawaban mulai dari dokumen pertanggungjawaban perbulan,perbulan,preprogram bahkan sampai perrekening belanja.

Sistem ini memadukan model *e-budgeting* dan *e-auditing* yang diharapkan bisa lebih memudahkan auditor Inpektorat Kota Makassar dalam melihat proses pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan SKPD secara online,dimana yang selama ini dilakukan secara manual. *Smart Auditing* menyediakan data pertanggungjawaban keuangan yang bermanfaat dalam menunjang kelancaran pengawasan dan pengendalian

program atau kegiatan SKPD yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah. Untuk lebih jelasnya sistem kerja *Smart Auditing* dapat dilihat melalui bagan berikut:



Gambar 4.3  
Sistem Kerja Smart Auditing

Pada Inspektorat Kota Makassar pemeriksaan berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Inspektur yang menunjukkan SKPD apa yang akan diperiksa dan tim yang akan melakukan pemeriksaan pada SKPD tersebut. Auditor pada Inspektorat kota Makassar terbagi menjadi 6 Tim masing-masing memeriksa 10 SKPD. Pada 6 tim audit tersebut terdiri dari Wakil Penanggung Jawab (WPJ), Ketua dan beberapa anggota. Setelah diberikan surat tugas tim pemeriksa selanjutnya melapor ke kepala SKPD terkait bahwa akan dilakukan pemeriksaan. Kemudian setelah melakukan pelaporan kepada SKPD tersebut tim auditor login ke akun *Smart Auditing* dengan menggunakan *user account* dan *password* yang diberikan kepada setiap penanggungjawab tim pemeriksa.

Pemberian *user account* dan *password* ini berikan pada saat kegiatan *Choacing Clinic* Audit berbasis Elektronik, setelah itu auditor dapat melakukan pemantauan mengenai program dan kegiatan apa yang akan dan telah dilakukan oleh SKPD terkait setiap bulannya. Pemeriksaan yang dilakukan yaitu dengan sistem pemeriksaan semesteran yakni pemeriksaan yang dilakukan setiap 6 bulan sampai dengan tahap pemantauan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang periksa setiap tahunnya.

Dengan adanya Smart Auditing memungkinkan auditor untuk dapat berinteraksi dengan auditi (SKPD) untuk menyampaikan hasil pemeriksaan sementara, begitu juga dengan auditi dapat dengan segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut melalui sistem tersebut. Cara komunikasi tersebut dilakukan secara online, hanya saja jika ada temuan yang dianggap sangat *urgent* maka antara auditor dan auditi komunikasi dapat dilakukan secara *offline* yaitu dengan turun melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan.

Bedasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 yang mengatur tentang standar audit aparat pemerintah dijelaskan bahwa: komunikasi mengenai tanggung jawab penyelesaian tindak lanjut dimaksudkan untuk menegaskan bahwa auditi bertanggung jawab untuk menindak lanjuti temuan dan rekomendasi audit. Penegasan ini di perlukan agar pihak auditi dapat mengambil tindakan konkrit sesegera mungkin. Kesalahan atau kekeliruan yang tidak segera diperbaiki akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Selama ini belum ditemukan kendala karena komunikasi tim telah dilakukan secara intens, baik tim audit maupun SKPD terkait. Jadi prosesnya itu setelah tim audit melakukan pemeriksaan akan dikomunikasikan terkait dengan hasil pemeriksaan atau temuan yang ada di lapangan.

Untuk mengoperasikan *Smart Auditing* dibutuhkan infrastruktur pendukung seperti komputer, scanner, jaringan internet serta kesiapan untuk membangun sistemnya sebab *Smart Auditing* terintegrasi dengan pengelolaan keuangan. Di masa pandemi seperti ini juga *Smart Auditing* merupakan solusi bagi para auditor sebab untuk meakukan pemeriksaan tidak perlu tatap muka, pemeriksaan bisa lebih cepat dilakukan, dokumen lebih teratur dan dapat dengan mudah di deteksi serta jika ada kesalahan bisa segera diperbaiki.

## **B. Hasil Penelitian**

Keefektifan dalam menjalankan suatu aktivitas senantiasa harus di lengkapi dengan rambu-rambu untuk dipenuhi sepenuhnya dan apabila dikemas dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi akan memberikan hasil yang semaksimal mungkin dan bisa menciptakan kekuatan organisasi yang baik yang berkaitan dengan pemerintahan maupun yang berkaitan dengan swasta.

Kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah terlihat dari semakin

meningkatnya secara signifikan besaran APBD Kota Makassar dan bertambahnya program dan kegiatan pada seluruh SKPD setiap tahunnya.

Tabel 4.2  
Data Program, Kegiatan dan Anggaran Lingkup Pemerintah Kota Makassar

No	Tahun	Program	Kegiatan	APBD/Rp
1	2016	563	2798	2.297.696.665.300
2	2017	537	3702	2.512.612.337.354
3	2018	581	4097	2.12.620.498.500

Sumber : BPKAD Kota Makassar, 2018

Berdasarkan data APBD Kota Makassar TA 2018, jumlah program dan kegiatan yang dikelola seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar yakni sebanyak 581 program dan 4097 kegiatan. Dengan memperhatikan data-data tersebut kemudian membandingkan dengan keterbatasan SDM yang dimiliki oleh Inspektorat Kota Makassar saat ini yang hanya memiliki jumlah auditor bersertifikasi sebanyak 23 orang. Pengembangan Sistem Pemeriksaan Berbasis Elektronik (*Smart Auditing*) sejalan dengan konsep *Sombere dan Smart City* Pemerintah Kota Makassar yang mengharuskan seluruh SKPD agar menerapkan teknologi informasi untuk mengefisienkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sehingga akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kegiatan sebagai upaya untuk mencegah berbagai penyimpangan (*fraud*) yang mungkin dapat terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan SKPD. Aplikasi *Smart Auditing* akan menyediakan *big data* pertanggungjawaban keuangan yang sangat bermanfaat dalam menunjang kelancaran kegiatan pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan SKPD yang dilaksanakan Inspektorat Kota Makassar.

Adapun indikator untuk mengukur efektivitas program *Smart Auditing*

peneliti mengambil teori menurut Sutrisno (2007) mengidentifikasi hasil studi para ahli mengenai indikator efektifitas, yaitu:

### 1. Pemahaman program

Pemahaman program maksudnya melihat bagaimana cara untuk memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang *Smart Auditing* kepada auditor, apakah para auditor dapat memahami maksud dan tujuan serta sistem kerja *Smart Auditing* tersebut. Dalam hal ini dibutuhkan peranan pihak Inspektorat untuk memberikan sosialisasi/bimbingan teknis yang dilakukan secara berkala oleh para auditor. Dalam wawancara dengan LK, selaku analis sistem informasi Inspektorat Kota Makassar mengatakan bahwa :

"Smart Auditing diperkenalkan melalui bimbingan teknis dimana dalam bimbingan teknis tersebut diperkenalkan bagaimana cara penggunaan, pengoperasian dan pemeriksaan melalui *Smart Auditing*. Bimbingan teknis tersebut bukan hanya dilakukan satu tetapi dilakukan beberapakali, selain bimbingan teknis ada juga yang namanya pelatihan sendiri dan jika dalam bimbingan teknis tersebut ada yang kurang dipahami bisa langsung ditanyakan kepada yang membuat aplikasi" (Wawancara dengan LK Tanggal 08/12/2020)

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa telah melakukan sosialisasi dalam memberikan pemahaman kepada para auditor mengenai program *Smart Auditing*, dalam sosialisasi tersebut auditor akan akan diberikan informasi terkait cara penggunaan, pengoperasian dan pemeriksaan, tujuan, dan apabila ada hal yang kurang dipahami oleh auditor, bisa disampaikan kepada pihak yang membuat aplikasi tersebut. Hal ini juga didukung melalui wawancara dengan GB selaku aditor madya yang mengatakan bahwa:

"Sosialisasi merupakan tahap awal untuk mengetahui apa itu *Smart Auditing* dan tentu setelah adanya sosialisasi ada yang nama pengenalan aplikasi dan bagaimana cara penggunaannya. Sosialisasi juga ada beberapakali dan sistem kerjanya sangat mudah dipahami dan sangat membantu auditor dalam melakukan pemeriksaan." (Wawancara dengan GB Tanggal 14/01/2021)

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan dilakukannya sosialisasi secara berkala dapat memudahkan para auditor untuk memahami segala sistem kerja yang terdapat dalam *Smart Auditing* karena tidak semua auditor mampu mengoperasikan teknologi modern seperti komputer dengan baik. Hasil wawancara tersebut juga diperkuat melalui wawancara yang dilakukan dengan N, selaku yang juga auditor muda mengatakan bahwa:

"*Smart Auditing* diperkenalkan oleh Pak Inspektur melalui bimbingan teknis dan bagaimana cara menggunakan *Smart Auditing*, karena saya gagap teknologi awalnya saya merasa susah tetapi karena adanya bimbingan teknik maka disitu dijelaskan mulai darimana dan apa yang harus dilakukan setelahnya. Jadi pada akhirnya saya bisa mengoperasikan karena sudah terbiasa dan sekarang sudah jadi mudah" (wawancara dengan N, tanggal 14/01/2021)

Dalam wawancara tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman mengenai IT sangat berpengaruh untuk mengoperasikan *Smart Auditing* maka dari itu diadakan sosialisasi untuk membimbing para auditor.

Dalam wawancara dengan Y, selaku auditor pertama mengatakan bahwa:

"Sistem kerja *Smart Auditing* mudah dipahami karena sebelum *Smart Auditing* di *Launching* kepada pihak luar *Smart Auditing* sudah di sosialisasikan kepada seluruh auditor, jadi sudah dipahami bagaimana cara melihat dokumen yang diunggah oleh SKPD tersebut." (wawancara dengan Y, tanggal 08/12/2020)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa para

auditor telah memahami sistem kerja pada *Smart Auditing* tersebut. Hasil wawancara tersebut juga diperkuat melalui hasil wawancara yang dilakukan dengan S, selaku Auditor Madya mengatakan bahwa:

“Kalau sistem kerja sebenarnya sama dengan yang manual cuma ini adalah pengalihan dari dokumen manual ke digital, jadi sistem kerjanya lebih lebih gampang sehingga lebih mudah di mengerti, menu-menu yang ditampilkan juga sederhana dan gampang di akses melalui website atau situs untuk menyimpan data serta bekerjasama dengan aplikasi keuangan yang ada di Balaikota. Jadi kita dapat melihat gambaran mengenai program kegiatan dari SKPD tersebut tanpa harus melihat fisik dari dokumennya” (wawancara dengan S, tanggal 08/12/2020)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pihak Inspektorat telah melakukan kerjasama dengan bagian keuangan di Balaikota sehingga dapat terkoneksi langsung untuk melihat data pertanggung jawaban dan penganggaran keuangan oleh SKPD sehingga para auditor bisa lebih mudah untuk melakukan pemeriksaan kapan saja dan dimana saja dengan melalui jaringan internet. Dalam hasil wawancara dengan AD, selaku pengendali teknis Inspektorat kota Makassar yang mengatakan bahwa:

“Sebelum *Smart Auditing* diluncurkan Inspektur terlebih dahulu memberitahukan bahwa apa itu *Smart Auditing* dan manfaatnya. Kemudian para auditor memahami dan melaksanakan *Smart Auditing* sesuai dengan yang diharapkan oleh inspektur. Setelah itu diperkenalkan kemudian para auditor dibagi atas 6 tim pemeriksaan yang diberikan username serta password untuk masing-masing tim pada saat yang bersangkutan melakukan pemeriksaan di awal tahun untuk melakukan pemeriksaan dengan demikian para auditor sudah bisa mengakses aplikasi *Smart Auditing* tersebut” (wawancara dengan AD, tanggal 8/12/2020)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa masing-masing auditor memiliki tanggung jawab sesuai dengan dan fungsi mereka

masing- masing dalam mengoperasikan *Smart Auditing*.

## 2. Tepat Sasaran

Tepat sasaran merupakan indikator yang penting dalam menentukan berhasil tidaknya suatu program, dalam pelaksanaan program *Smart Auditing* yang ingin dilihat adalah ketepatan sasarnya apakah sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau tidak. Dalam program *Smart Auditing* sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pertanggungjawaban pengelolaan kegiatan dan keuangan pada seluruh SKPD dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar. Dalam hasil wawancara dengan LK selaku analis sistem informasi Inspektorat kota Makassar mengatakan bahwa:

“Dulu sebelum ada *Smart Auditing* untuk melakukan pemeriksaan auditor harus ke SKPD yang terkait dan yang bikin ribet itu biasanya ruangan dipenuhi dengan dokumen kemudian harus di periksa satu persatu dan akan memakan banyak waktu dan tenaga. Nah sekarang berbeda, tanpa harus mengunjungi SKPD tersebut kita sudah bisa melakukan pemeriksaan langsung dengan cara harus mengupload dokumen-dokumen tersebut yang sebelumnya harus di scan terlebih dahulu.” (Wawancara dengan LK, tanggal 08/12/2020)

Dalam wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa aparat pemeriksa lainnya, baik internal maupun eksternal sekarang sudah lebih mudah untuk mengakses dokumen pertanggungjawaban yang ada pada database untuk tujuan pemeriksaan. Hal ini juga didukung melalui wawancara dengan AD selaku pengendali teknis yang mengatakan bahwa:

“Sasarannya itu untuk memudahkan auditor, artinya pada saat sebelum melakukan pemeriksaan kita membuka dulu aplikasi *Smart Auditing* tersebut untuk melihat gambaran umum dari SKPD tersebut

untuk melihat berapa anggaran yang digunakan, kegiatan apa saja yang mereka telah dan akan mereka lakukan atau program-program apa saja yang ada di SKPD yang akan dilakukan pemeriksaan nantinya. Sehingga bisa melakukan tindakan atau sasaran apa yang akan dicapai pada saat dilakukan pemeriksaan” (Wawancara dengan AD, tanggal 08/12/2020)

Dalam wawancara tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya *Smart Auditing* para auditor dalam melakukan kegiatan pemeriksaan lebih cepat dan menyeluruh walaupun jumlah auditor terbatas karena akses terhadap dokumen pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan dengan sistem online sehingga dapat dilakukan deteksi dini potensi penyimpangan. Hal yang sama juga di katakan dalam hasil wawancara dengan IW, selaku auditor muda bahwa:

“Dengan adanya *Smart Auditing* sangat membantu auditor mulai dari efektivitas waktu kemudian sasaran-sasaran yang akan dicapai bisa diketahui terlebih dahulu sehingga para auditor tidak perlu lagi melakukan konfirmasi secara berulang-ulang ke SKPD terkait jika ada dokumen atau data yang kurang” (Wawancara dengan IW, tanggal 14/01/2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa SKPD lebih tertib dan tepat waktu dalam menyusun dokumen pertanggungjawaban keuangan sehingga meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pertanggungjawaban pengelolaan kegiatan dan keuangan pada seluruh SKPD. Hasil wawancara lainnya dengan Y, selaku auditor pertama yang mengatakan bahwa:

“Sampai saat ini *Smart Auditing* cukup berjalan dengan baik apalagi dengan kemudahan-kemudahan yang di dapat dan para SKPD juga mempunyai kewajiban untuk melakukan upload data dan pada saat pandemi seperti ini juga sangat memudahkan karena tidak harus ke SKPD tersebut secara langsung, walaupun nantinya harus ke SKPD tersebut mungkin ada yang benar-benar urgent karena kondisi seperti

ini mempengaruhi mobiltas kita dalam bekerja.” (Wawancara dengan Y, tanggal 03/13/2020)

Dalam hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa, dengan adanya *Smart Auditing* sangat membantu kinerja para auditor di masa pandemi seperti ini karena melaukan pemeriksaan tidak perlu melakukan tatap muka.

### 3. Tepat waktu

Tepat waktu dalam suatu program yaitu sesuai dengan jadwal atau target yang telah ditentukan sebelumnya, dengan penggunaan waktu yang tepat maka program dapat dikatakan efektif. Dalam suatu program, ketepatan waktu sangat diperlukan untuk mencapai efektivitas, oleh karena itu pendekatan yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga mampu menciptakan efektivitas tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, apakah program program smart auditing berhasil atau tidak. Dalam hasil wawancara dengan LK, selaku analisis sistem informasi mengatakan bahwa:

“Dengan diterapkannya *Smart Auditing* ini sangat menunjang kelancaran kegiatan pengawasan, pengendalian program serta kegiatan SKPD lebih cepat secara *real time* dengan sistem *online* yang tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi memberikan dampak terhadap penyusunan SPJ di seluruh SKPD menjadi lebih teratur dan tepat waktu.” (Wawancara dengan LK, tanggal 08/12/2020)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat menunjukkan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mengakses dokumen SPJ jauh lebih cepat dan mudah sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja

pertanggungjawaban pengelolaan kegiatan dan keuangan pada seluruh SKPD. Akan tetapi hal tersebut berbeda dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan AD selaku pengendali teknis yang mengatakan bahwa:

“Kecepatan dalam pemeriksaan bisa lebih cepat dibandingkan dengan yang manual dan harapannya seperti itu namun masih ada beberapa hambatan dari pihak SKPD yang biasanya belum mengunggah dokumen mereka.” (Wawancara dengan AD, tanggal 08/12/2020)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun dalam hal pemeriksaan bisa dilakukan dengan cepat tetapi masih ada kendala yang harus dihadapi oleh auditor terkait dengan keterlambatan SKPD yang lain dalam mengunggah dokumen mereka sehingga waktu para auditor untuk menyelesaikan tugas tepat pada waktunya cukup terhambat. Dalam hasil wawancara dengan GB, selaku Auditor muda mengatakan bahwa:

“Idealnya kalau tepat waktu itu sudah bisa, karena sudah tidak perlu lagi ke tempat SKPD ketika merasa masih ada dokumen atau data yang kurang, jadi para auditor bisa langsung membuka *Smart Auditing* dan langsung melihatnya.” (Wawancara dengan GB, tanggal 14/01/2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa para auditor sudah bisa menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Hasil wawancara tersebut juga diperkuat melalui hasil wawancara yang dilakukan dengan Y, selaku Auditor Pertama mengatakan bahwa:

“Efektivitas waktu tentu lebih singkat dan sangat memudahkan apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini kita tidak perlu lagi melakukan permintaan data serta konfirmasi secara berulang-ulang ke SKPD dan dengan adanya *Smart Auditing* ini lebih bisa memudahkan kita dalam melakukan pemeriksaan.” (Wawancara dengan Y, tanggal 03/12/2020)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya smart auditing cukup membantu para auditor mulai dari efektivitas waktu kemudian saran yang akan dicapai bisa diketehui lebih dahulu Jadi penggunaan waktu tentunya lebih efektif dengan adanya *Smart Auditing*.

#### 4. Tercapainya Tujuan

Tercapainya tujuan dilihat dari berhasil atau tidaknya suatu usaha yang dilakukan dalam mencapai apa yang telah diharapkan atau direncanakan sebelumnya, dalam suatu program tentu sangat diharapkan dapat mencapai tujuan sehingga dibutuhkan perananan dari pihak Inspektorat dan pihak luar dalam mendukung pelaksanaan program *Smart Auditing*.

Tujuan dari program *Smart Auditing* yaitu untuk mewujudkan pola pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan SKPD secara elektronik dan *online* yang lebih cepat dan mudah, sehingga dapat mengetasi kekurangan jumlah auditor dan dapat melakukan deteksi dini atas ppotensi peyimpangan yang dapat terjadi pada SKPD dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan. Selain itu juga untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam menyelesaikan proses pertanggungjawaban kegiitan dan keuangannya tepat, teratur dan terdkumentasi dengan baik. Dalam hasil wawancara dengan AD, selaku pengendali teknis mengatakan bahwa:

“Sejak pertamakali mencoba *Smart Auditing* ini tujuannya adalah

kecepatan dalam penyelesaian pemeriksaan bisa lebih cepat dibandingkan dengan yang manual, harapan kita seperti itu namun masih ada hambatan dari pihak SKPD dalam mengunggah dokumen ke *Smart Auditing*, tetapi bagi SKPD yang sudah mengunggah maka kecepatan kami pada saat melakukan pemeriksaan bisa lebih bagus dan lebih cepat.” (wawancara dengan AD, tanggal 08/12/2020)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa tujuan dari program *Smart Auditing* adalah kecepatan dalam hal penyelesaian pemeriksaan. Namun untuk mencapai sebuah tujuan tentunya selalu ada hambatan-hambatan dalam proses untuk mencapai tujuan tersebut, seperti yang dikatakan oleh LK selaku analis sistem informasi Inspektorat kota Makassar bahwa:

“Hambatan yang terjadi biasanya semacam teknis yaitu jaringan dan sepertinya wajar saja dan apabila jaringan itu sudah bagus sudah bisa berjalan dengan lancar selain itu hambatan lainnya berasal dari SKPD itu sendiri yaitu masih banyak belum mengunggah dokumennya ke *Smart Auditing* jadi auditor sedikit merasa kesusahannya kemudian auditor memberikan keterangan di *Smart Auditing* tersebut bahwa SKPD tersebut belum mengunggah dokumen.” (Wawancara dengan LK, Tanggal 08/12/2020)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa *Smart Auditing* masih dalam tahap proses pemantauan, dan SKPD pun masih membutuhkan pendampingan dalam pengimputan data. Hal ini juga didukung melalui wawancara dengan Y selaku auditor pertama mengatakan bahwa:

“Ada beberapa kendala seperti jaringan terus ada juga beberapa SKPD yang belum mengunggah berkas yang kita butuhkan untuk diperiksa apalagi SKPD besar yang memiliki banyak banyak kegiatan seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum” (Wawancara dengan Y, tanggal 03/12/2020)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa

SKPD juga harus disiplin dalam mengunggah data artinya dibutuhkan juga dorongan dari pihak inspektorat agar SKPD tersebut untuk bisa mengunggah dokumen-dokumen mereka. Akan tetapi hal tersebut berbeda dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan GB Selaku auditor muda mengatakan bahwa:

"Sejauh ini sudah berjalan sesuai harapan cuma kadang kekurangannya yaitu banyak SKPD yang masih belum mempunyai scanner yang memiliki kecepatan tinggi karena sebelum di unggah dokumen tersebut harus di ubah terlebih dahulu kedalam bentuk digital." (Wawancara dengan GB, tanggal 14/01/2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa, hal penting yang perlu diperhatikan dalam mencapai sebuah tujuan salah satunya dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan secara keseluruhan. Dalam hasil wawancara dengan S selaku auditor madya, mengatakan bahwa:

"Hambatannya yaitu cuma scanner ditahun 2019, tetapi masalah scanner itu sudah selesai dan komitmen dari Pak Walikota pada saat itu semua SKPD di tahun 2020 harus mempunyai scanner tingkat tinggi untuk memudahkan dalam pengalihan dokumen ke bentuk digital. Jadi sekarang yang dibutuhkan akses internet yang cepat untuk dapat melihat dan mengunggah dokumen. Selain itu jika ada perpindahan jabatan mereka yang baru harus belajar dari awal bagaimana cara mengoperasikan *Smart Auditing*, tapi sejauh ini karena mereka sudah berpengalaman di bagian keuangan jadi bisa lebih mudah di mengerti. Jadi yang sangat penting dalam pengoperasian *Smart Auditing* yaitu jaringan internet karena *Smart Auditing* tidak bisa di operasikan jika dalam keadaan *offline*." (Wawancara dengan, tanggal 14/01/2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa adanya *Smart Auditing* sangat didukung oleh Pemerintah Kota Makassar baik dukungan dalam bentuk kebijakan maupun kebutuhan dana dalam

pelaksanaannya. Bentuk dukungannya dengan penyediaan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana berupa (komputer/laptop, scanner, jaringan internet).

Hasil wawancara lainnya dengan N, selaku selau auditor muda mengatakan bahwa:

“Untuk lingkup Kota Makassar mereka menyambut dengan baik adanya *Smart Auditing* ini, karena biasanya jika ada kegiatan pemeriksaan membutuhkan dokumen pertanggungjawaban jadi kadang dokumen itu harus digandakan lagi sehingga ada lagi semacam biaya lagi yang dikeluarkan untuk penggandaan, tetapi dengan adanya *Smart Auditing* hal itu bisa kita efisiensi biaya penganggarnya. Dengan demikian mereka sangat merespon baik dan memberikan dukungan” (Wawancara dengan N, tanggal 14/01/2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dukungan dan komitmen yang kuat yang kuat dari seluruh kepala SKPD dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar dibutuhkan untuk tercapainya tujuan dari *Smart Auditing*.

##### 5. Perubahan Nyata

Perubahan nyata yaitu adanya perubahan keadaan yang terjadi sebelum dan setelah adanya program *Smart Auditing*. Perubahan nyata yang dimaksud yaitu melihat bahwa sejauhmana program *Smart Auditing* dapat memberikan efek atau dampak serta perubahan yang nyata bagi pihak Inspektorat terkhususnya para auditor dalam menjalankan tugasnya, apakah dapat merasakan adanya perubahan atau dampak dengan adanya program *Smart Auditing* tersebut. Dalam hasil wawancara yang dilakukan dengan AD, selaku pengedali teknis *Smart Auditing* Inspektorat Kota

Makassar yang mengatakan bahwa:

“Seperti yang ketahui bahwa sebelumnya auditor melakukan pemeriksaan secara manual dimana yang kita lihat biasanya tumpukan dokumen yang begitu banyak, maka kesan pertama kita adalah menurunkan semangat para auditor karena akan ada sekian banyak dokumen yang akan kita audit. Tetapi dengan adanya *Smart Auditing* tim pemeriksa tidak akan pernah lagi melihat tumpukan dokumen yang banyak itu dan bisa membuka langsung *Smart Auditing* setiap saat, kapan pun dan dimana pun selama ada jaringan internet para auditor bisa lebih mudah mengakses sehingga lebih cepat dari yang biasanya.” ( Wawancara dengan AD, tanggal 08/12/2020).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa program *Smart Auditing* mampu memberikan perubahan terkait dengan tumpukan dokumen yang akan di audit dimana akan membutuhkan lagi biaya untuk penggandaan, tetapi dengan adanya *Smart Auditing*, hal seperti itu bisa mengefisienkan biaya penganggaran dengan demikian beban APBD khususnya dari belanja penggandaan bisa di hemat lagi atau digunakan ke belanja yang lainnya. Dalam hasil wawancara dengan LK, selaku analis sistem informasi yang mengatakan bahwa:

“Sebelum adanya *Smart Auditing* biasa Auditor akan lebih lama menunggu dokumen-dokumen yang diminta pada saat pemeriksaan dan setelah adanya *Smart Auditing* itu sudah bisa lebih efisien karena berkas sudah berkurang, kita suda bisa melakukan pemeriksaan kapan saja selama ada jaringan internet dan lewat hp pun bisa dilakukan.”( Wawancara dengan LK, tanggal 08/12/2020).

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya *Smart Auditing* bisa lebih memudahkan auditor untuk melakan pemeriksna kapan saja dan dimana saja. Hal ini juga didukung melalui wawancara dengan S, selaku auditor madya yang mengtakan bahwa:

“Perubahan dulu sebelum adanya *Smart Auditing* SPJ yang tebal itu

di periksa satu persatu dan membuang banyak waktu, nah sekarang kita tinggal membuka Smart Auditing sudah kelihatan dan bisa langsung diperiksa dan bisa lebih cepat kerjanya. Keunggulan lainnya yaitu bisa mempercepat proses pemeriksaan kami di Inspektorat dan laporannya bisa tepat waktu.” (wawancara dengan S, tanggal 08/12/2020)

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan bahwa keunggulan dari *Smart Auditing* selain bisa di akses kapan saja dan dimana saja juga bisa mempercepat proses pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor sehingga bisa lebih menghemat waktu dan laporan yang dikerjakan bisa selesai tepat pada waktunya. Pendapat lain juga disampaikan dalam wawancara dengan GB, selaku auditor muda yang mengatakan bahwa:

“Dengan *Smart Auditing* bisa lakukan pemeriksaan sebelum adanya penugasan dengan demikian fungsi inspektorat juga ada pemberian *early warning* yakni pencegahan, artinya sebelum adanya pemeriksaan jika SKPD sudah mengunggah dokumen pertanggungjawaban dan jika ada kekurangan-kekurangan maka auditor sudah bisa menyampaikan kepada SKPD untuk dilengkapi sebelum dilakukan audit yang sesungguhnya, jadi keunggulannya sangat besar untuk *Smart Auditing* ini.” (Wawancara dengan GB, tanggal 14/01/2021).

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa *Smart Auditing* juga mempermudah auditor dalam melakukan pemeriksaan terutama pada saat melakukan *survey* pendahuluan untuk mencari titik kritis dimana bisa dilihat permasalahan-permasalahan apa yang harus di periksa. Dalam hasil wawancara dengan Y, selaku auditor pertama mengatakan bahwa:

“Dengan adanya *Smart Auditing* bisa melakukan pemeriksaan tanpa harus berkunjung SKPD terkait yang dimana bisa dapat menghambat pekerjaan mereka yang lain dan dapat menyita waktu yang cukup banyak karena kita mengambil waktunya mereka untuk menyiapkan data-data yang kita butuhkan. Jadi kita cukup mementau saja melalui *Smart Auditing* ini untuk memastikan kegiatan mereka terlaksana.”

(Wawancara dengan Y, tanggal 03/12/2020)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya *Smart Auditing* memberikan kemudahan pada tim pemeriksa baik internal maupun eksternal untuk mengakses database dokumen pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan. Hasil wawancara lainnya dengan IW, selaku auditor muda mengatakan bahwa:

"Dulu sebelum adanya *Smart Auditing* banyak kami ditemukan kekurangan pada SPJ karena tidak teraturnya pengarsipan dan proses pendokumentasian SPJ dan dengan kondisi seperti itu membutuhkan tambahan auditor, tapi setelah adanya *Smart Auditing* akses terhadap SPJ jauh lebih mudah karena Pelaksanaan pemeriksaan dokumen SPJ dapat dilakukan secara *real time* karena sistemnya *on line*" (Wawancara dengan IW, tanggal 14/01/2020)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa program *Smart Auditing* mampu memberikan perubahan yang nyata terhadap kinerja auditor dimana kegiatan pemeriksaan yang selama ini dilakukan oleh Inspektorat secara manual yang membutuhkan tenaga dan waktu yang banyak kini bisa dilakukan secara online tanpa harus beradadi objek pemeriksaan (SKPD). Hal ini dapat dilakukan karena dokumen pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan sudah diinput oleh masing-masing SKPD kedalam sistem sehingga database terputat secara elektronik. Walaupun dengan kondisi jumlah auditor yang terbatas tetap dapat dilakukan pemeriksaan dengan lebih cepat dan mudah, sehingga dapat mendeteksi dini potensi penyimpangan yang terjadi.

### C. Pembahasan Penelitian

Tabel 4.3  
Kondisi Sebelum dan Setelah Adanya *Smart Auditing*

No.	Kondisi sebelum adanya Smart Auditing	Kondisi setelah adanya Smart Auditing
1.	Pelaksanaan pemeriksaan dokumen SPJ di SKPD secara langsung	Pelaksanaan pemeriksaan dokumen SPJ dapat dilakukan secara <i>real time</i> karena sistemnya <i>on line</i>
2.	Waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan verifikasi dokumen SPJ berlangsung lama, karena ketidakpastian dokumen SPJ dari SKPD	Pemeriksaan lebih cepat karena data pada sistem dapat digunakan sebagai bahan informasi pendahuluan
3.	Tidak teraturnya pengarsipan dan proses pendokumentasian SPJ, sehingga banyak terdapat kekurangan dokumen SPJ yang ditemukan	Dokumen SPJ lebih teratur dan dapat dilakukan deteksi awal terhadap kekurangan dokumen SPJ
4.	Dokumen SPJ tidak dibuat tepat waktu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Pelaporan dokumen SPJ tepat waktu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
5.	Akses terhadap dokumen SPJ sulit	Akses terhadap dokumen SPJ menjadi mudah
6.	Tidak terdapat database dokumen SPJ secara terpusat pada SKPD	Terdapat database dokumen SPJ secara terpusat pada SKPD

Sumber : Inspektorat Kota Makassar

Proses pemeriksaan yang dulu dilakukan dengan cara manual dengan kondisi jumlah auditor yang terbatas tentunya sulit dan membutuhkan waktu yang lama dalam penyelesaiannya serta auditor lambat dalam mendeteksi adanya potensi penyimpangan. Sekarang dengan adanya *Smart Auditing* proses pemeriksaan dilakukan secara online, walaupun dengan kondisi jumlah auditor

yang terbatas tetap dalam dilakukan dengan lebih cepat dan mudah sehingga dapat mendeteksi dini potensi penyimpangan yang terjadi.

### 1. Pemahaman Program

Pemahaman program menurut Sutrisno (2007) yaitu dilihat dari sejauhmana masyarakat dapat memahami kegiatan program, maksudnya melihat bagaimana cara untuk memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang *Smart Auditing* kepada auditor, apakah para auditor dapat memahami maksud dan tujuan serta sistem kerja *Smart Auditing* tersebut. Manila dalam Jones (1996) berpendapat bahwa program akan menunjang implementasi, program tersebut memuat berbagai aspek salah satunya ialah adanya strategi dalam pelaksanaan, dalam hal ini strategi yang dibutuhkan ialah peranan dari pihak Inspektorat untuk memberikan sosialisasi/bimbingan teknis yang dilakukan secara berkala oleh para auditor.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara menilai bahwa pihak inspektorat telah melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada para auditor dengan tujuan agar para auditor mengetahui maksud dan tujuan diluncurkannya *Smart Auditing* tersebut dan apabila ada hal yang kurang dipahami oleh auditor, bisa disampaikan kepada pihak yang membuat aplikasi tersebut hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sugiono dalam Budiani (2007) mengatakan bahwa sosialisasi program memampukan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat

tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.

Sosialisasi mengenai *Smart Auditing* secara berkala agar dapat memudahkan para auditor untuk memahami segala sistem kerja yang terdapat dalam *Smart Auditing* karena tidak semua auditor mampu mengoperasikan teknologi modern seperti komputer dengan baik, sehingga pemahaman mengenai IT sangat berpengaruh untuk mengoperasikan *Smart Auditing* maka dari itu diadakan sosialisasi untuk membimbing para auditor.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara menilai bahwa program *Smart Auditing* disambut dengan baik dan para auditor juga telah memahami sistem kerja pada *Smart Auditing* tersebut. Pihak Inspektorat juga telah melakukan kerjasama dengan bagian keuangan di Balaikota sehingga dapat terkoneksi langsung untuk melihat data pertanggung jawaban dan penganggaran keuangan oleh SKPD sehingga para auditor bisa lebih mudah untuk melakukan tanggung jawab sesuai dengan dan fungsi mereka masing-masing dalam mengoperasikan *Smart Auditing* kapan saja dan dimana saja dengan melalui jaringan internet.

## 2. Tepat Sasaran

Tepat sasaran merupakan indikator yang penting dalam menentukan berhasil tidaknya suatu program, dalam pelaksanaan program *Smart Auditing* yang ingin dilihat adalah ketepatan sasaran yang ingin dicapai apakah sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau tidak, sejalan

dengan teori yang dikeluarkan oleh Sutrisno (2007) bahwa tepat sasaran dilihat dari apa yang diinginkan tercapai atau menjadi kenyataan. Dalam program *Smart Auditing* sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pelaksanaan pemeriksaan yang dilaksanakan Inspektorat Darah Kota Makassar.

Penentuan sasaran yang tepat dari suatu individu atau organisasi akan sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi, begitu juga sebaliknya jika sasaran yang ditentukan itu kurang tepat maka akan menghambat pelaksanaan kegiatan itu sendiri (Makmur, 2011). Sasaran diluncurkannya *Smart Auditing* ini adalah auditor itu sendiri dengan adanya *Smart Auditing* ini para auditor dapat melakukan kegiatan pemeriksaan lebih cepat dan menyeluruh meskipun jumlah auditor terbatas serta akses terhadap dokumen pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan dilakukan dengan sistem online.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara menilai bahwa SKPD lebih tertib dan tepat waktu dalam menyusun dokumen pertanggungjawaban keuangan sehingga meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pertanggungjawaban pengelolaan kegiatan dan keuangan pada seluruh SKPD. Ketepatan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional, penentu sasaran yang tepat baik ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi, *Smart Auditing* juga sangat membantu kinerja para auditor di masa pandemi seperti ini karena

untuk melakukan pemeriksaan tidak perlu melakukan tatap muka dan jika memang harus ke SKPD yang terkait itu dikarenakan ada hal yang benar-benar *urgent* karena kondisi pandemi yang berjalan seperti ini mempegaruhi mobilitas auditor dalam bekerja.

### 3. Tepat waktu.

Tepat waktu menurut Sutrisno (2007) dilihat dari sejauhmana program bisa mempengaruhi penggunaan waktu dalam pelaksanaan pelayanan/pekerjaan. Tepat waktu dalam suatu program yaitu sesuai dengan jadwal atau target yang telah ditentukan sebelumnya, dengan penggunaan waktu yang tepat maka program dapat dikatakan efektif. Dalam suatu program, ketepatan waktu sangat diperlukan untuk mencapai efektivitas, oleh karena itu pendekatan yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi sangat berpengaruh dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga mampu menciptakan efektivitas tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, apakah program program smart auditing berhasil atau tidak.

Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara menilai bahwa dengan adanya *Smart Auditing* waktu yang dibutuhkan untuk mengakses dokumen SPJ jauh lebih cepat dan mudah sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pertanggungjawaban pengelolaan kegiatan dan keuangan pada seluruh SKPD, hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Makmur (2011) yang menyatakan waktu merupakan

dasar dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dalam sebuah organisasi tetapi juga dapat memberikan dampak berupa kegagalan terhadap suatu aktivitas organisasi. Namun meskipun dalam hal pemeriksaan bisa dilakukan dengan cepat tetap saja masih ada kendala yang harus dihadapi oleh auditor terkait dengan keterlambatan SKPD yang lain dalam mengunggah dokumen mereka sehingga waktu yang dibutuhkan oleh para auditor untuk menyelesaikan tugas tepat pada waktunya cukup terhambat.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara ini juga menilai bahwa dengan adanya *Smart Auditing* cukup membantu para auditor mulai dari efektivitas waktu kemudian sasaran yang akan dicapai bisa diketahui lebih dahulu. Jadi penggunaan waktu tentunya lebih efektif walaupun dengan jumlah auditor yang terbatas. Apapun yang menggunakan waktu secara tepat akan mampu menciptakan efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya hal ini juga sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Siagian dalam Indrawijaya (2010) memberikan pengertian tentang efektivitas yaitu penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Dalam hal ini suatu pelaksanaan tugas dinilai baik atau tidak dilihat bagaimana melaksanakannya dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu.

#### **4. Tercapainya tujuan**

Tercapainya tujuan dilihat dari berhasil atau tidaknya suatu usaha yang dilakukan dalam mencapai apa yang telah diharapkan atau

direncanakan sebelumnya, menurut Sutrisno (2007) mengatakan bahwa tercapainya tujuan juga diukur dengan melalui pencapaian tujuan program yang telah dijalankan, dan dalam suatu program tentu sangat mengharapkan dapat mencapai tujuan sehingga dibutuhkan perananan dari pihak Inspektorat dan pihak luar dalam mendukung pelaksanaan program *Smart Auditing*.

Tujuan dari program *Smart Auditing* yaitu untuk mewujudkan pola pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan SKPD secara elektronik dan online yang lebih cepat dan mudah, sehingga dapat mengatasi kekurangan jumlah auditor dan dapat melakukan deteksi dini atas potensi penyimpangan yang dapat terjadi pada SKPD dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan. Selain itu juga untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam menyelesaikan proses pertanggungjawaban kegiatan dan keuangannya tepat, teratur dan terdokumentasi dengan baik.

Ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan aktivitas organisasi didalam mencapai tjuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang tepat akan mampu mendukung efektivitas pelaksanaan terutama yang berorientasi dalam jangka panjang (Makmur,2011). Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara menilai bahwa menunjuk tujuan dari program *Smart Auditing* adalah kecepatan dalam hal penyelesaian pemeriksaan. Namun untuk mencapai sebuah tujuan tentunya selalu ada hambatan-hambatan dalam proses untuk mencapai tujuan tersebut dan fakta yang ditemukan dilapangan bahwa masih ada beberapa SKPD yang

terlambat dalam melakukan upload data karena belum memiliki scanner dengan kecepatan tinggi karena sebelum dokumen diunggah harus diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk digital.

*Smart Auditing* masih sampai saat ini masih dalam tahap proses pemantauan, dan SKPD pun masih membutuhkan pendampingan dalam pengimputan data, SKPD juga harus disiplin dalam mengunggah data dalam hal ini pengaruh kepemimpinan (*leader*) sangat penting agar kegiatan yang saling terkait dapat diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya artinya dibutuhkan juga dorongan dari pihak Inspektorat agar SKPD tersebut untuk bisa mengunggah dokumen-dokumen mereka. Selain itu hal penting yang perlu diperhatikan dalam mencapai sebuah tujuan salah satunya dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan secara keseluruhan.

Sutarto dalam taglisan (2002) berpendapat bahwa untuk mencapai sebuah efektifitas ada beberapa faktor yang mempengaruhi yakni faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal mencakup suatu jaringan hubungan-hubungan pertukaran dengan sejumlah lembaga dan melibatkan diri dengan maksud untuk mendapatkan dukungan, mengatasi hambatan dan melakukan sumber daya. Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara menilai bahwa adanya *Smart Auditing* sangat didukung oleh Pemerintah Kota Makassar baik dukungan dalam bentuk kebijakan maupun kebutuhan dana dalam pelaksanaannya. Bentuk dukungannya

dengan penyediaan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana berupa (komputer/laptop, scanner, jaringan internet). Sedangkan faktor internal meliputi keseluruhan faktor yang ada, hubungan kerjasama yang baik maka keberhasilan pencapaian tujuan akan lebih cepat. Kerjasama ini bukan hanya terjadi antara individu dengan individu melainkan dapat juga dengan individu dengan instansi atau instansi dengan instansi (Tangkilisan, 2005). Dukungan dan komitmen yang kuat yang kuat dari seluruh kepala SKPD dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar sangat berpengaruh untuk mencapai tujuan dari *Smart Auditing*.

#### 5. Perubahan nyata

Perubahan nyata dalam menurut Sutrisno (2007) dalam teorinya yaitu diukur dengan melalui sejauh mana program tersebut mampu memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat dalam hal ini perubahan nyata adalah adanya perubahan keadaan yang terjadi sebelum dan setelah adanya program *Smart Auditing*. Perubahan nyata yang dimaksud yaitu melihat bahwa sejauhmana program *Smart Auditing* dapat memberikan efek atau dampak serta perubahan bagi pihak Inspektorat terkhususnya para auditor dalam menjalankan tugasnya, apakah dapat merasakan adanya perubahan atau dampak dengan adanya program *Smart Auditing* tersebut.

Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara menilai bahwa program *Smart Auditing* mampu memberikan perubahan terutama pada saat akan melakukan pemeriksaan dimana sebelum adanya *Smart Auditing*

banyak tumpukan dokumen yang akan membutuhkan lagi biaya untuk penggandaan, tetapi dengan adanya *Smart Auditing* hal seperti itu bisa mengefisienkan biaya penganggaran, dengan demikian beban APBD khususnya dari belanja penggandaan bisa di hemat lagi atau digunakan ke belanja yang lainnya. Selain itu *Smart Auditing* juga bisa lebih memudahkan auditor untuk melakan pemeriksaan kapan saja dan dimana saja, juga bisa mempercepat proses pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor sehingga bisa lebih menghemat waktu dan laporan yang dikerjakan bisa selesai tepat pada waktunya.

Perubahan yang dirasakan oleh para auditor adalah *Smart Auditing* juga mempermudah dalam melakukan pemeriksaan terutama pada saat melakukan *survey* pendahuluan untuk mencari titik kritis dimana bisa dilihat permasalahan-permasalahan apa yang harus di periksa Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa dengan adanya *Smart Auditing* memberikan kemudahan pada tim pemeriksa baik internal maupun eksternal untuk mengakses database dokumen pertanggungjawaban keuangan dan kegiatancepat dan mudah sehingga dapt mendeteksi dini potensi penyimpangan yang terjadi.

Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara menilai bahwa *Smart Auditing* mampu memberikan perubahan yang nyata terhadap kinerja auditor sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (2006) yang mengatakan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai.

Hal tersebut sangat penting perannya di dalam setiap lembaga dan berguna untuk melihat perkembangan maupun kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga, seperti halnya dengan kegiatan pemeriksaan dulu dilakukan oleh inspektorat secara manual yang membutuhkan tenaga dan waktu yang banyak kini bisa dilakukan secara *online* dan *real time* tanpa harus berada di objek pemeriksaan (SKPD). Hal ini dapat dilakukan karena dokumen pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan sudah di input oleh masing-masing SKPD kedalam sistem sehingga database terpusat secara elektronik. Walaupun dengan kondisi jumlah auditor yang terbatas tetap dapat dilakukan pemeriksaan dengan lebih cepat.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan indikator pada pengukuran efektivitas pada program *Smart Auditing* dilihat dari pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata dalam proses pelaksanaan program *Smart Auditing* dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pemahaman Program, menunjukkan bahwa bahwa pihak Inspektorat telah melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada para auditor dengan tujuan agar para auditor mengetahui maksud dan tujuan diluncurkannya *Smart Auditing* tersebut. Sosialisasi mengenai *Smart Auditing* pun berjalan dengan lancar yang dilaukan secara berkala agar dapat memudahkan para auditor untuk memahami segala sistem kerja yang terdapat dalam *Smart Auditing*, sehingga pemahaman program ini sudah bisa di katakan efektif.
2. Tepat Sasaran, dapat dikatakan efektif karena dengan adanya *Smart Auditing* ini para auditor dapat melakukan kegiatan pemeriksaan lebih cepat dan menyeluruh meskipun jumlah auditor terbatas.
3. Tepat Waktu, dalam hal penggunaan waktu sudah bisa dikatakan efektif karena penyelesaian pemeriksaan bisa lebih cepat dibandingkan dengan yang manual karena pemeriksaan dilakukan secara *online* sehingga para auditor bisa menyelesaikan tugas tepat pada waktunya meskipun dengan jumlah auditor yang terbatas.

4. Tercapainya Tujuan, menunjukkan belum bisa dikatakan efektif karenamasih banyaknya hambatan-hambatan yang dirasakan oleh auditor seperti lambatnya para SKPD mengunggah dokumen yang akan di periksa serta sarana dan prasarana yang belum di dapatkan secara keseluruhan oleh SKPD.
5. Perubahan Nyata, sudah bisa dikatakan efektif karena para auditor sangat merasakan perubahan sebelum dan setelah Smart Auditing ini diluncurkan, dimana kegiatan pemeriksaan yang selama ini dilakukan oleh Inspektorat secara manual yang membutuhkan tenaga dan waktu yang banyak kini bisa dilakukan secara *online* tanpa harus berada di objek pemeriksaan (SKPD).

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran yaitu:

1. Diharapkan dalam pelaksanaan program *Smart Auditing* lebih meningkatkan sarana dan prasaran yang penunjang kinerja SKPD salah satunya dengan pengadaan scanner berkekuatan untuk seluruh SKPD agar dapat memudahkan dalam hal mengunggah dokumen.
2. Diharapkan pihak Inspektorat untuk terus memberikan dorongan terhadap SKPD terkait untuk dapat mengunggah dokumen yang akan diperiksa agar para auditor dapat melaukan pemeriksaan dan menyelesaikan tugas tepat pada waktunya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. (2013). *Auditing Petunjuk Praktis pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Awaluddin (2013). Pengaruh Independensi dan Kompetensi Auditor Terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Auditor Inspektorat Kota Makassar. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi, Volume (3) No.2*
- Budiani, N. W. (2007). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna (Eka Taruna Bhakti) Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Sosial, Volume (2) No.1*
- Canalldhy, R. S. & Nabilah. (2018). Efektivitas Fungsi Pengawasan Inspektorat Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus Badan Kepegawalan dan Diklat Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016). *Jurnal Pemerintah dan Politik, Volume (3) No.1 Januari 2018*
- Dityatama (2012). Pengaruh Kualitas Audit Internal Terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. *Jurnal Ilmu Administrasi, Volume (9) No.1 April 2012*.
- Handyaningrat, S. (2006). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung
- Hasibuan & Malaya, S.P. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- <https://makassarkota.go.id/geografis/>
- <https://bpkad.makassar.go.id/bpakdmakassar/>
- Indrawijaya, A.I. (2010). *Teori, Perilaku, dan Budaya Organisasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Inspektorat Kota Makassar. ( 31 Mei 2018). *Launching Smart Auditing*. Diperoleh dari <https://www.inspektorat.makassarkota.go.id/detailpost/launching-smartauditing>.
- Jones, C. O. (1996). *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Terjemahan Ricky Ismanto. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Makmur, (2011). *Efektivitas Kebijakan Lembaga Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.

Pasolong, H. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Ruddin, A. (2015). Efektivitas Pengawasan Khusus Oleh Inspektorat Kabupaten Sigi. *Jurnal Katalogis Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako Volume(3)*, Hal. 35-44

Sedarmayanti, (2006). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Bumi Aksara

Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sutarto, (2002). *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Sutrisno, E. (2007). *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta : Kencana

Tangkilisan. (2002). *Manajemen SDM Birokrasi Publik : Strategi keunggulan pelayanan public*, YPAPI, Jogjakarta

Tribun-timur.com. (31 Mei 2018). *Auditor Kurang, Inspektorat Makassar Sebut Smart Auditing Jadi Solusi*. Diperoleh dari <https://makassar.tribunnews.com/2018/05/31/auditor-kurang-inspektorat-makassar-sebut-smart-auditing-jadi-solusi>.

Yuliani, K. F. (2017). *Efektivitas Program Pelayanan Kesehatan Gratis (P2km) di Kota Bandarlampung (Skripsi)*. Universitas Lampung. Bandarlampung

L

A

M



P

I

R

A

N

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian




**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN**

---

Nomor : 0422/S.01/PTS/2020  
 KepadaYth.  
 KepalaYth.  
 Universitas Muhammadiyah Makassar  
 di  
 Tempat

Berdasarkan surat Keputusan DPM UNISMA Makassar No. 14/10/2020 dan tanggal 12 November 2020 perihal persetujuan mahasiswa yang dibawah ini:

Nama : NURI IRMA  
 Nomor Pokok : 1511120316  
 Program Studi : Ilmu Administrasi  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 250 Makassar

Bertindak untuk melakukan penelitian di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul:

**"EFEKTIVITAS PROGRAM SMART AUDITING DI KANTOR GOVERNORAT KOTA MAKASSAR"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 14 November 2020 s.d. 14 Januari 2021

Demikian surat ini diterbitkan, dan ini adalah dokumen yang sah dan resmi.

Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 No. 157105011956051004



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH**  
**MAKASSAR**  
**UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Makassar, 12 November 2020

Ditandatangani oleh:  
 1. Kepala UPT Perustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar  
 2. Penanggung

Nomor PPT/03/14/2020

Di Yogyakarta No. 5 Telp. (0411) 441027 Fax. (0411) 440936  
 Website: <http://www.uin-suka.ac.id> Email: [ptb@uin-suka.ac.id](mailto:ptb@uin-suka.ac.id)  
 Makassar 90231





PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111  
Telp +62411 - 2810001 Fax +62411 - 2810002  
Email: [Kasbanad@makassar.go.id](mailto:Kasbanad@makassar.go.id) Home page: <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 19 November 2020

Nomor 070/2250-//BKBP/03/2020  
Sifat  
Perihal Izin Penelitian

Kepada  
TUJUH KEPALA INSPEKTORAT KOTA MAKASSAR  
DI  
Makassar

Dengan Hormat,  
Menindak Surat dan Kepala Badan Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Kota Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 442/BA/PTSP/2020 Tanggal 12  
November 2020. Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak

Nama: **NUR IRMA**  
NIM / Jurusan: **10561120016 Ilmu Adm. Negara**  
Pekerjaan: **Mahasiswa(S1) / UNIGMUIH**  
Alamat: **Jl. Dr. Alauddin No. 259 Makassar**  
Judul: **EFEKTIVITAS PROGRAM SMART AUDITING DI KANTOR**  
**INSPEKTORAT KOTA MAKASSAR**

Demikian mengabarkan Penelitian pada materi / Widyawan Bapak dalam  
rangka **Penyusunan Skripsi** akhir dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan  
mulai tanggal 16 November 2020 s.d 14 Januari 2021.

Setubuhan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat menyetujui  
dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian ini

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi. Sehubungan yang  
bersangkutan memberikan hasilnya kepada Walikota Makassar Co. Kepala Badan  
Kesatuan Bangsa dan Politik

A.n WALIKOTA MAKASSAR



**I. H. JAMAING, M.Sc**  
Widyawan Pembina Utama Muda  
NIP. 19501231 198003 1 064

Tembusan:

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar.
- 2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Perencanaan Modal Daerah Prov. Sul Sel. di Makassar.
- 3. Ketua CPSM UNIGMUIH Makassar di Makassar.
- 4. Mahasiswa yang bersangkutan.
- 5. Arsip



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
INSPEKTORAT**

Jalan Sultan Hasanudin No. 01 Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90000  
Telp. (0411) 822300, Fax. (0411) 822500  
E-mail: inspektorat\_makassar@pkk.go.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 0020/Insp/070/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : NUR IRMA  
NIM / Jurusan : 105611120016 / Ilmu Administrasi Negara  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah

Teah melaksanakan Penelitian di Inspektorat Daerah Kota Makassar berdasarkan Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Nomor 070/2250-II/BKBR/XI/2020 tanggal 16 November 2020 dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul

"EFEKTIVITAS PROGRAM SMART AUDITING DI KANTOR INSPEKTORAT KOTA MAKASSAR"

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar 5 Januari 2021

dr. INSPEKTUR  
Sekretaris

**H. DAHYAL, S.Sos, M.Si**  
Pangkat: Pembina Tk. I  
NIP. 19730005 109303 1 007

Lampiran 2 :

## Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul "Efektivitas Program *Smart Auditing* di Kantor Inspektorat Kota Makassar". Berikut Draft wawancara berdasarkan teori dari Sutrisno (2007:125-126) yang terdiri dari lima indikator dalam menjawab rumusan masalah bagaimana Efektivitas *Smart Auditing* Di Kantor Inspektorat Kota Makassar

Lokasi : Inspektorat Kota Makassar

Fokus : Efektivitas Program *Smart Auditing* di Kantor Inspektorat Kota Makassar

### 1. Pemahaman program

- 1) Langkah apa saja yang dilakukan untuk memperkenalkan *Smart Auditing* kepada para auditor?
- 2) Apakah sistem kerja *Smart Auditing* mudah di pahami?

### 2. Tepat Sasaran

- 1) Apa yang menjadi sasaran dari pelaksanaan program *Smart Auditing*?
- 2) Apakah dengan adanya *Smart Auditing* bisa memudahkan para auditor untuk melaksanakan tugasnya yang selama ini hanya dilakukan secara manual?

### 3. Tepat Waktu

- 1) Dengan adanya *Smart Auditing*, apakah auditor sudah bisa menyelesaikan tugasnya tepat pada waktunya?
- 2) Apa saja hambatan yang mempengaruhi penggunaan waktu dalam menjalankan program *Smart Auditing*?

### 4. Tercapainya Tujuan

- 1) Bagaimana peran atau upaya dalam mencapai tujuan dari program *Smart Auditing*?
- 2) Apakah program *Smart Auditing* sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya?

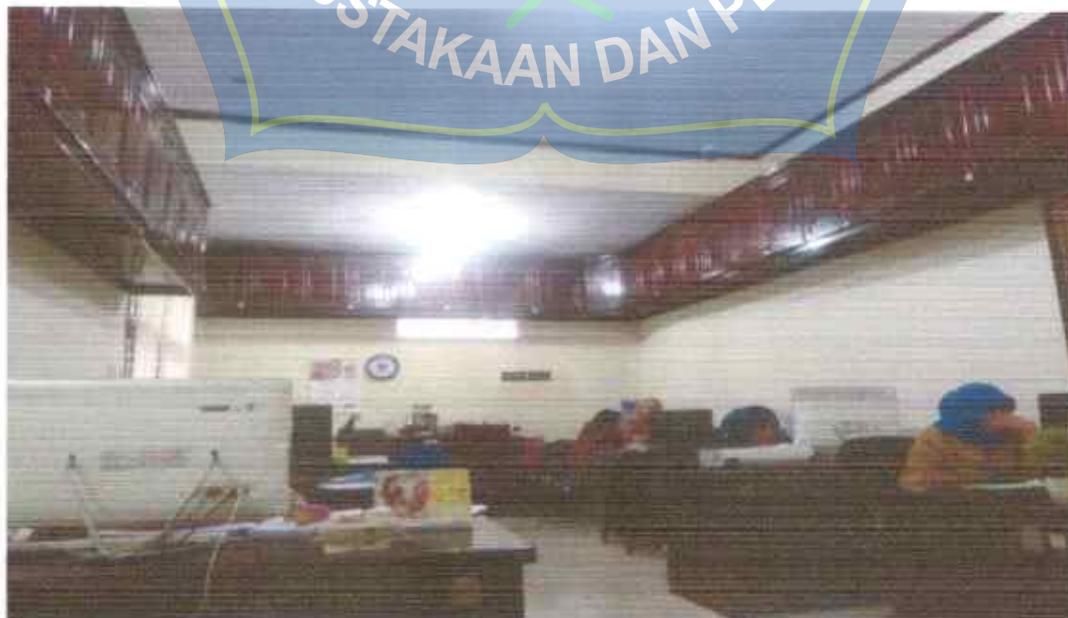
### 5. Perubahan Nyata

- 1) Apa saja keunggulan dari program *Smart Auditing*?
- 2) Apa saja perubahan yang di rasakan para auditor sebelum dan setelah adanya program *Smart Auditing*?

## Lampiran 3 : Dokumentasi



Suasana Lokasi Penelitian Inspektorat Kota Makassar



Suasama Ruangan Audito



Wawancara Dengan Yasser, S.E. Selaku Auditor Pertama di Inspektorat Kota Makassar (tanggal 03/12/2020).



Wawancara Dengan Leonardo konstantin, S.Kom. Selaku Auditor Analis Sistem Informasi di Inspektorat Kota Makassar (tanggal 08/12/2020).



Wawancara Dengan Syahriyanti, S.Sos. Selaku Auditor Madya di Inspektorat Kota Makassar (tanggal 08/12/2020).



Wawancara Dengan Drs. Arwin Dahlan. M.Si. Selaku Pengendali Teknis di Inspektorat Kota Makassar (Tanggal 08/12/2020).



Wawancara Dengan Nurawaliah, S.E. Selaku Auditor Muda di Inspektorat Kota Makassar (Tanggal 14/01/2021)



Wawancara Dengan Imelda Wiraswanti,S.E. Selaku Auditor Muda di Inspektorat Kota Makassar (tanggal 08/12/2020).

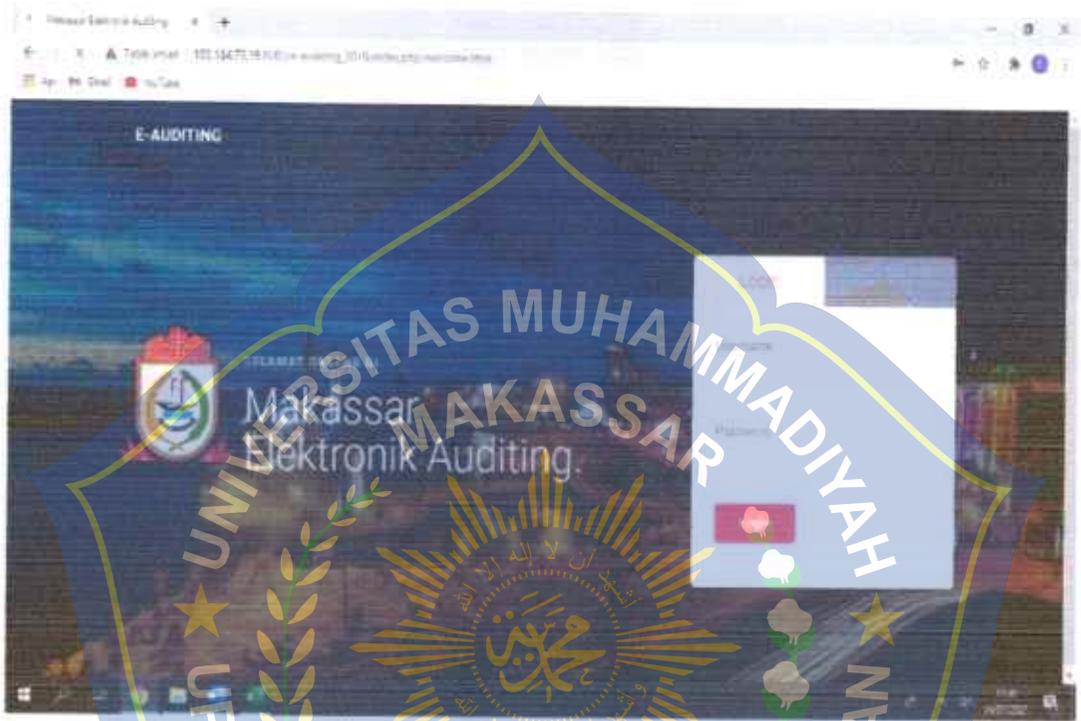


Wawancara Dengan Gatoet, S.T. Selaku Auditor Muda di Inspektorat Kota Makassar (tanggal 14/01/2021)

Lampiran 4: Struktur Organisasi



Lampiran 5: *Smart Auditing*



Tampilan Halaman Awal *Smart Auditing*

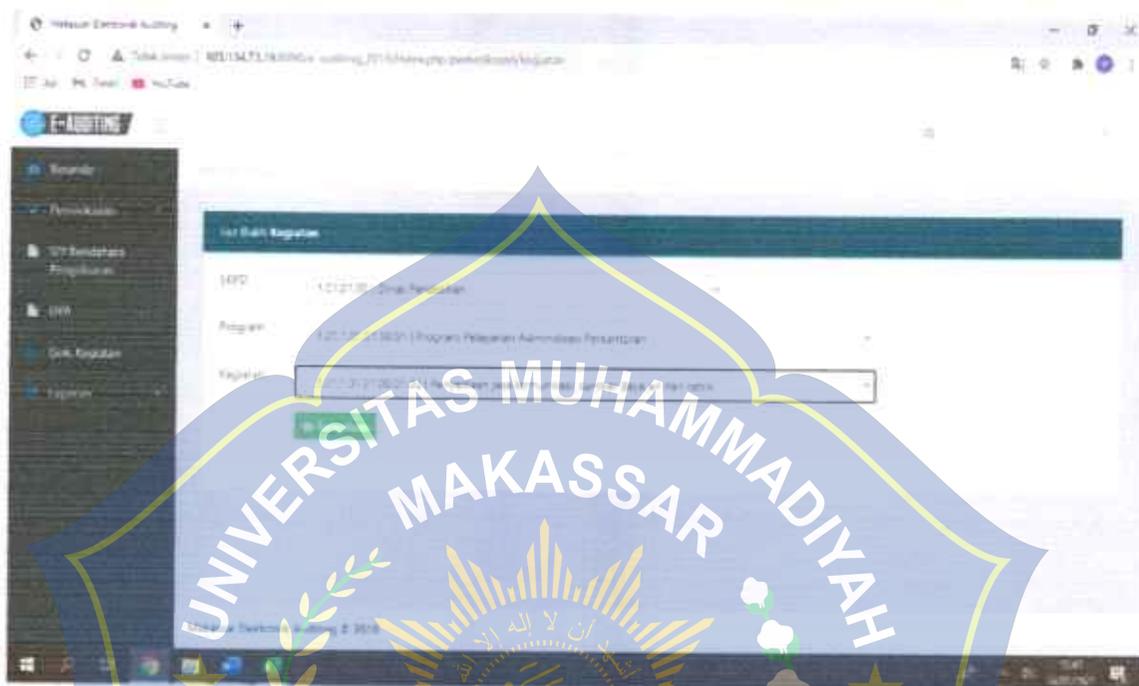


Tampilan Menu Pada Beranda *Smart Auditing*



Tampilan Pemeriksaan Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Setiap SKPD

Tampilan Daftar Anggaran Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Setiap SKPD



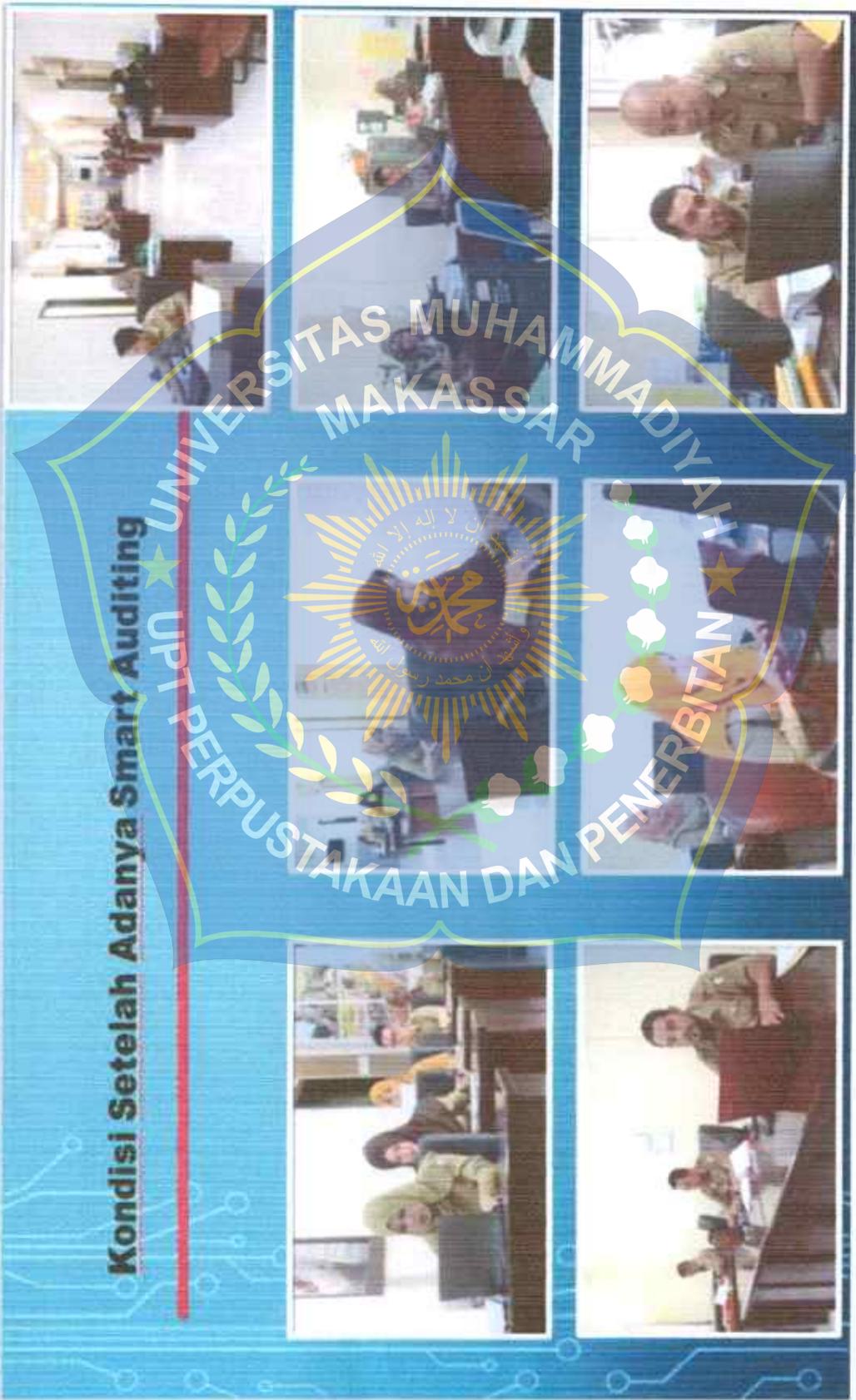
Pemeriksaan Dokumentasi Program dan Kegiatan Yang Telah Dilakukan Oleh

SKPD



**Kondisi Sebelum Adanya Smart Auditing**





## RIWAYAT HIDUP



Nur Irma, dilahirkan di Ujung Pandang pada tanggal 06 Februari 1998. Anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan suami istri Abd.Rahman dan Nurlia. Riwayat pendidikan penulis yaitu menyelesaikan pendidikan formal di SD Negeri Labuang Baji II pada tahun 2010. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 18 Makassar dan tamat pada tahun 2013, kemudian pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai siswa SMK Negeri 1 Makassar dan tamat pada tahun 2016. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Makassar yaitu Universitas Muhammadiyah Makassar pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Penulis aktif di Organisasi internal kampus yaitu Lembaga *Centre of English Studies (Cesist)* Ilmu Administrasi Negara sebagai Direktur II.

Penulis telah berhasil menyelesaikan pekerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penelitian tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi terutama bagi dunia pendidikan khususnya dalam pengembangan disiplin Ilmu Administrasi Negara. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul "Efektivitas Program *Smart Auditing* di Kantor Inspektorat Kota Makassar".